

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENDIDIKAN
DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TERHADAP JUMLAH PENGANGGURAN
TERBUKA DI PROVINSI JAMBI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari**

OLEH :
NAMA : RAESA INDANA ZULFA
NIM : 2000860201006

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini komisi Pembimbing Skripsi Menyatakan bahwa skripsi sebagai berikut:

Nama : Raesa Indana Zulfa

NIM : 2000860201006

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Judul : **Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi**

Telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diuji pada ujian skripsi dan kompherensif sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.

Pembimbing Skripsi I



(Hj. Susilawati, S.E,M.Si)

Pembimbing Skripsi II



(M. Syukri, SE.Sy, M.E)

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan



(Hj. Susilawati, S.E,M.Si)

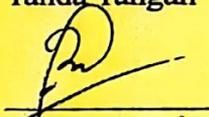
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi secara komprehensif Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 5 November 2024

Pukul : 13.00 s/d 15.00 WIB

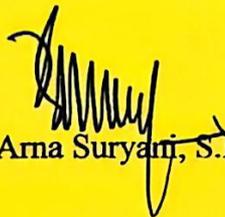
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonoi Universitas Batanghari

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Pantun Bukit, SE,M.Si	
Sekretaris	M. Syukri, SE.Sy,M.E	
Penguji Utama	Dr. M. Zahari MS.SE,M.Si	
Anggota	Hj. Susilawati, SE,M.Si	

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Batanghari

Prof. Dr. Hj. Arna Suryani, S.E, M.Ak, Ak, CA



Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Hj. Susilawati, S.E,M.Si



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raesa Indana Zulfa

NIM : 2000860201006

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing : 1. Hj. Susilawati, S.E,M.Si

2. M. Syukri, SE.Sy,M.E

Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahawa penulisan skripsi ini berdasarkan penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri, bahwa data-data yang saya cantumkan pada skripsi ini adalah benar bukan hasil plagiatisme atau diupahkan pada pihak lain. Jika terdapat karya atau pemikiran orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, Desember 2024



Raesa Indana Zulfa

Nim. 2000860201006

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan berkat, rahmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini yang disusun dalam bentuk Skripsi dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi Tahun 2004-2023 “.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sastra 1 Jurusan Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini penulis mendapatkan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini bisa dapat di selesaikan. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan masa studi kuliah dan tugas akhir skripsi ini. Kedua orangtua, yaitu kepada ayah (Edy Riyanto) dan ibu (Ramani) yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini, serta adik, alm kakek, nenek dan paman saya yang selalu mendukung dan memberi motivasi yang tidak henti-hentinya sehingga di dalam proses penggalian inspirasi, penulisan sampai pada akhir pembuatan skripsi ini. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H,M.Pd selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Ibu Prof Dr. Hj. Arna Suryani, S.E, M.AK,AK,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Hj. Susilawati, S.E,M.Si sebagai Pembimbing I selaku ketua program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Batanghari Jambi dan juga sebagai Pembimbing I yang telah sabar membimbing, memberi arahan, nasehat serta telah memberikan dan meluangkan waktunya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Syukri, SE.Sy., ME sebagai Pembimbing II yang telah sabar membimbing, memberi arahan, nasehat serta telah memberikan dan meluangkan waktunya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf yang ada di Universitas Batanghari Jambi, yang semasa perkuliahan telah memberikan ilmu serta nasehat yang baik kepada penulis.
6. Sahabat terdekat penulis Saskia, Lili, Winda, Ismi, Evi yang selalu menemani dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Serta seseorang yang selalu memberikan energi dan suasana hati yang positif setia menemani penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk dukungan dan pengalaman yang indah selama masa kuliah untuk teman-teman kelas Ekonomi Pembangunan yang telah bersama-sama menyelesaikan mata kuliah selama menempuh studi di Universitas Batanghari Jambi. Teman-teman Program Studi Ekonomi Pembangunan, yang selalu memberikan semangat kepada penulis semasa perkuliahan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha menyusun dengan semaksimal mungkin dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan semua pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu semua kritik, saran dan masukan yang ada sangat di harapkan.

Penulis juga ingin meminta maaf atas semua kesalahan atau kekhilafan yang disengaja ataupun tidak disengaja selama proses penyusunan skripsi ini.

Jambi, Oktober 2024

Raesa Indana Zulfa

ABSTRAK

(RAESA INDANA ZULFA / 2000860201006 / PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2004-2023 / PEMBIMBING I Hj SUSILAWATI S.E,M.Si / PEMBIMBING II MUHAMMAD SYUKRI S.E.Sy., ME.)

Masalah pengangguran merupakan masalah ekonomi yang dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi politik dan ekonomi sosial. Pengangguran merupakan masalah strategis dalam perekonomian secara makro, karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan APBD Provinsi Jambi selama periode tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS, dengan periode penelitian dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2023, untuk mengukur hubungan antar variabel bebas yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah variabel terikat yaitu jumlah pengangguran terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka, sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan

terhadap jumlah pengangguran terbuka. Selain itu, realisasi APBD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

Model tersebut menjelaskan sebesar 41,7% variasi pengangguran terbuka, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar cakupan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan kualitas pendidikan dan optimalisasi penggunaan APBD.

Kata kunci : Jumlah penduduk, tingkat pendidikan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, jumlah pengangguran terbuka

ABSTRACT

(RAESA INDANA ZULFA / 2000860201006 / THE EFFECT OF POPULATION, EDUCATION LEVEL AND REALIZATION OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET IN JAMBI PROVINCE 2004-2023 / ADVISOR I Hj SUSILAWATI S.E,M.Si / ADVISOR II MUHAMMAD SYUKRI S.E.Sy., ME.)

Unemployment is an economic problem that can manifest several adverse effects that are political economy and social economy. Unemployment is a strategic problem in the macro economy, because it directly affects the standard of living and psychological stress of the community.

This study aims to analyze the influence of population, education level and realization of regional revenue and expenditure budget (APBD) on the number of open unemployment in Jambi Province. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Jambi Province APBD report for a certain period.

The method used in this study is multiple linear regression using SPSS, with a research period from 2004 to 2023, to measure the relationship between independent variables, namely population, education level and realization of regional revenue and expenditure budgets, the dependent variable is the number of unemployed. The results of the study indicate that the population does not have a significant effect on the number of unemployed, while the level of education has a significant effect on the number of unemployed. In addition, the realization of the APBD does not have a significant effect on the level of unemployed in Jambi Province.

The model explains 41.7% of the variation in open unemployment, while the rest is influenced by variables outside the scope of this study. This study is expected to be a reference for local governments in formulating effective policies to reduce unemployment rates by improving the quality of education and optimizing the use of the APBD.

Keywords: Population, education level, realization of regional revenue and expenditure budgets, number of unemployed

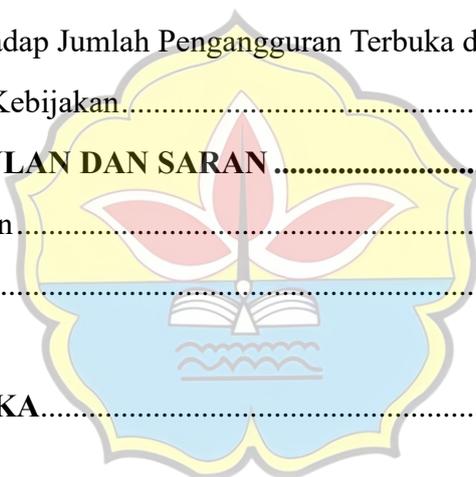
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I, PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat	13
BAB II, TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN	15

2.1 Tinjauan Pustaka.....	15
2.1.1 Landasan Teori	15
2.1.1.1 Ekonomi Pembangunan.....	15
2.1.1.2 Teori Ekonomi Pembangunan.....	15
2.1.2 Jumlah Pengangguran Terbuka	17
2.1.2.1 Pengertian Pengangguran	17
2.1.2.2 Jenis-jenis Pengangguran	19
2.1.2.3 Faktor-faktor Pengangguran.....	21
2.1.2.4 Teori-teori Pengangguran	22
2.1.3 Jumlah Penduduk	24
2.1.3.1 Pengertian Jumlah Penduduk.....	24
2.1.3.2 Teori-teori Jumlah Penduduk.....	27
2.1.4 Tingkat Pendidikan	28
2.1.4.1 Pengertian Tingkat Pendidikan.....	28
2.1.4.2 Jenjang Pendidikan	29
2.1.4.3 Teori-teori Pendidikan	32
2.1.5 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).....	33
2.1.5.1 Pengertian Realisasi APBD	33
2.1.5.2 Tujuan dan Tantangan Realisasi APBD	36
2.1.5.3 Teori-teori Realisasi APBD	37
2.1.6 Hubungan Antar Variabel.....	38
2.1.6.1 Jumlah Penduduk dengan Jumlah Pengangguran Terbuka.....	38
2.1.6.2 Pendidikan dengan Jumlah Pengangguran Terbuka	39
2.1.6.3 Realisasi APBD dengan Jumlah Pengangguran Terbuka	42
2.1.7 Penelitian Terdahulu.....	42
2.1.8 Kerangka Pemikiran.....	44
2.1.9 Hipotesis.....	46
2.2 Metode Penelitian	46

2.2.1 Jenis dan Sumber Data	46
2.2.2 Metode Pengumpulan Data	47
2.2.3 Metode Analisi	47
2.2.4 Uji Asumsi Klasik	49
2.2.5 Uji Hipotesis	52
2.2.6 Operasional Variabel	56
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	58
3.1 Letak Geografis Provinsi Jambi	58
3.2 Kondisi Geografis Provinsi Jambi	60
3.3 Demografi Provinsi Jambi	62
3.4 Topografi	63
3.5 Potensi Wilayah	64
3.6 Perekonomian Provinsi Jambi	65
3.7 Sektor-sektor Ekonomi Unggulan Provinsi Jambi	67
3.8 Tingkat Pendidikan Provinsi Jambi	68
3.9 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
4.1 Hasil Penelitian	71
4.1.1 Uji Asumsi Klasik	71
4.1.1.1 Uji Normalitas	71
4.1.1.2 Uji Multikolinearitas	72
4.1.1.3 Uji Heteroskedastisitas	72
4.1.1.4 Uji Autokolerasi	74
4.1.2 Persamaan Regresi Linier Berganda	75
4.1.3 Koefisien Determinasi R^2	76
4.1.4 Uji Hipotesis	78

4.1.4.1 Uji F (Simultan).....	78
4.1.4.2 Uji t (Parsial)	79
4.2 Pembahasan	81
4.2.1 Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.....	81
4.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi	82
4.2.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi	83
4.2.4 Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.....	84
4.3 Implikasi Kebijakan.....	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89





DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan	Halaman
1.1	Jumlah Penduduk Provinsi Jambi 2004-2023	5
1.2	Tingkat Pendidikan Provinsi Jambi 2004-2023	6
1.3	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi 2004-2023	8
1.4	Jumlah Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi 2004-2023	10
2.1	Penelitian Terdahulu	42
2.2	Kriteria Durbin Watson	51
2.3	Operasional Variabel	56
3.1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	59
3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2019-2023 ..	61
3.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi Tahun 2020-2023	65
3.4	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jambi	68
3.5	Tingkat Pendidikan berdasarkan Jenjang Sekolah	69

3.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi	70
4.1 Hasil Uji Normalitas.....	71
4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	72
4.3 Hasil Uji Autokolerasi	74
4.4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	75
4.5 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	77
4.6 Hasil Uji F (Simultan)	78
4.7 Hasil Uji t (Parsial).....	79



No. Tabel	Keterangan	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pemikiran.....	45
3.1	Peta Provinsi Jambi.....	58
4.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas	73



No. Tabel

Keterangan

Halaman

1. Data Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi 2004-2023	92
2. Data Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi 2004-2023	93
3. Data Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi 2004-2023.....	94
4. Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Jambi 2004 – 2023	95
5. Hasil Olah data SPSS (Uji asumsi klasik)	96
6. Titik Persentase Distribusi F	99
7. Titik Persentase Distribusi t	100



1.1 Latar Belakang Penelitian

Ekonomi pembangunan berkaitan dengan strategi untuk pertumbuhan ekonomi, transformasi sosial, dan perluasan kemungkinan bagi populasi di negara berkembang melalui bantuan pemerintah dan sektor swasta untuk kesehatan, pendidikan, dan kondisi kerja yang lebih baik. Ekonomi pembangunan juga mempelajari aspek ekonomi pembangunan, termasuk proses pembangunan, di negara-negara tersebut. Seiring dengan pertumbuhan penduduk suatu negara, pendapatan keseluruhan dan pendapatan per kapita meningkat. Hal ini dikenal sebagai pembangunan ekonomi. Seiring dengan ini, struktur ekonomi negara mengalami perubahan mendasar, dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat.

Pengangguran merupakan masalah strategis dalam perekonomian secara makro, karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Faktor penting yang menentukan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat adalah pendapatannya. Pendapatan yang maksimum tercapai jika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat direalisasikan. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan. Hasyim (2016:197).

Masalah pengangguran merupakan masalah ekonomi yang dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi politik dan ekonomi sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Untuk menghindari efek-efek buruk tersebut pemerintah perlu secara terus-menerus berusaha mengatasi masalah pengangguran. Pemerintah juga harus mempunyai kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan juga berusaha untuk mencapai beberapa tujuan yang bersifat politik dan sosial, Sukirno (2019:327).

Menurut Pratowo (2019:86).Pengangguran berdasarkan survei penduduk atas sensus tahun 1985 mengartikannya sebagai seseorang yang mencari pekerjaan atau berusaha mencari pekerjaan yang tidak memiliki batasan waktu satu minggu saja, namun dapat dilakukan dalam periode sebelumnya selama dalam kurun waktu satu minggu sebelum pencacahan masih berada pada status masih menunggu respons dari lamaran. Menurut Sukirno, pengangguran adalah jumlah tenaga kerja yang ada pada perekonomian baik secara aktif mencari pekerjaan atau belum memperoleh pekerjaan.

Pengangguran merupakan suatu fenomena yang terjadi di semua negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Pengangguran merupakan suatu permasalahan yang serius di Indonesia karena dampak dari adanya pengangguran akan menimbulkan masalah sosial. Pengangguran yang tinggi dapat menjadi sumber utama kemiskinan, dapat memicu kriminalitas yang tinggi serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Sari (2019:16).

Pengangguran juga merupakan pilihan bagi setiap individu. Di satu sisi, ada orang yang memang menyukai dan tidak ingin bekerja karena mereka malas, di lain pihak ada orang yang ingin bekerja dan sedang mencari pekerjaan tetapi mereka belum mendapatkan karena tidak sesuai dengan pilihannya atau bisa disebut dengan pengangguran sukarela. Salah satu gambaran dampak dari tingginya tingkat pengangguran yaitu akan ada banyaknya sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat berkurang. Dalam masa-masa seperti itu, tekanan ekonomi menjalar kemana-mana sehingga mempengaruhi emosi masyarakat maupun kehidupan rumah tangga sehingga akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Naf'an (2014:132).

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan yang sangat mendasar sebab dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta mengancam peningkatan pengangguran. Secara umum penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam suatu wilayah negara dalam waktu yang cukup lama. Jumlah

penduduk yang semakin meningkat diikuti dengan jumlah pengangguran apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja.

Menurut Bidarti (2020:184) Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah – ubah (bertambah atau berkurang) seiring dengan perjalanan waktu. Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat yaitu jumlah angkatan yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru.

Peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja tidak terlepas dari upaya peningkatan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan latihan standar upah yang baik, serta pengembangan yang dihasilkan dan disesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Tanpa suatu program pengembangan sumber daya manusia, maka produktivitas tenaga kerja.

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan yang sangat mendasar dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta mengancam peningkatan pengangguran.

Pertumbuhan penduduk merupakan proses perubahan jumlah penduduk serta komposisinya yang dipengaruhi tiga komponen demografi yaitu fertilitas,

mortalitas dan migrasi. Migrasi juga mempengaruhi tingkat pengangguran menurut Mulyadi (2016, 412) Provinsi Jambi, pada pola migrasi di sebagian daerah yang menarik migrasi karena potensi ekonominya, mungkin menghadapi masalah pengangguran jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai untuk pendatang. Karena jumlah penduduk yang tinggi di Provinsi Jambi. Berikut Tabel 1.1 jumlah penduduk Provinsi Jambi 2004-2023.

Tabel. 1.1
Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi tahun 2004-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)
1	2004	2.619.553	-
2	2005	2.635.968	0,63
3	2006	2.683.099	1,79
4	2007	2.742.196	2,20
5	2008	2.788.269	1,68
6	2009	2.834.164	1,65
7	2010	3.092.265	9,11
8	2011	3.169.814	2,51
9	2012	3.242.814	2,30
10	2013	3.317.034	2,29
11	2014	3.344.421	0,83
12	2015	3.402.052	1,72
13	2016	3.458.926	1,67
14	2017	3.515.017	1,62

15	2018	3.570.272	1,57
16	2019	3.624.579	1,52
17	2020	3.677.894	1,47
18	2021	3.585.100	(2,52)
19	2022	3.631.100	1,28
20	2023	3.760.275	3,56
Rata-rata		3.234.741	1,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024.

Keterangan : () Negatif

Berdasarkan tabel 1.1, tahun 2004 - 2023 telah menggambarkan jumlah penduduk yang mengalami perubahan atau fluktuasi. Pada tahun 2023, jumlah penduduk mencapai angka tertinggi dalam rentan waktu yang di amati, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak tahun 2004. Sebaliknya, pada tahun 2004 mencatat jumlah penduduk terendah dalam periode ini. Pada tahun 2004, jumlah penduduk mencapai 2.619.553 ribu jiwa, yang merupakan angka terendah dalam periode ini. Dari tahun 2004 hingga 2023, terjadi peningkatan jumlah penduduk secara signifikan. Data menunjukkan pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya dan kemungkinan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Pada tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 3.760.275 dengan persentase 3,56%, merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Dan hal ini mampu menggambarkan bahwa adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk menekan tingkat jumlah penduduk di Provinsi Jambi melalui pemerataan lapangan pekerjaan dan menekan adanya pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana.

Pada penjelasan seran (2016:7), Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, karena peningkatan produktivitas tenaga kerja yang bertumpu pada pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja manusia dan untuk meningkatkan taraf hidup manusianya. Pada umumnya seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas untuk meningkatkan kinerjanya. Pendidikan sebagai pengalaman belajar mempunyai bentuk, suasana, dan pola yang beraneka ragam. Pendidikan juga adalah suatu usaha sadar yang teratur dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang disertai tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan, Rodliyah (2021:28) .Tabel berikut menggambarkan Tingkat Pendidikan Provinsi Jambi 2009-2023.

Tabel 1.2
Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jambi tahun 2004-2023.

No	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (%)	(%)
1	2004	7,40	-
2	2005	7,54	1,89
3	2006	7,60	0,80
4	2007	7,66	0,79
5	2008	7,63	(0,39)
6	2009	7,68	0,66
7	2010	7,34	(4,43)
8	2011	7,48	1,91
9	2012	7,69	2,81
10	2013	7,80	1,43

11	2014	7,92	1,54
12	2015	7,96	0,51
13	2016	8,07	1,38
14	2017	8,15	0,99
15	2018	8,23	0,98
16	2019	8,45	2,67
17	2020	8,55	1,18
18	2021	8,60	0,58
19	2022	8,68	0,93
20	2023	8,81	1,50
Rata-Rata		7,96	0,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024.

Keterangan : () Negatif.

Berdasarkan Tabel 1.2, pada tahun 2004 - 2023 telah menggambarkan data rata-rata lama sekolah yang mengalami perubahan atau fluktuasi. Meskipun ada peningkatan secara keseluruhan selama 20 tahun terakhir, ada periode di mana angka rata-rata ini mengalami penurunan yang tajam, terutama pada tahun 2010 mencapai 7,34 dengan persentase -4,43%. Penurunan yang cukup drastis pada tahun 2010 merupakan tantangan untuk menghadapi sistem pendidikan pada waktu itu, mungkin keterbatasan sumber daya guru yang mengajar atau kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya efektif. Sedangkan pada tahun 2023, angka rata-rata lama sekolah merupakan angka yang paling tinggi dengan angka 8,81 dengan persentase 1,50%. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan anggaran pendidikan, pembangunan infrastruktur sekolah yang lebih merata, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD, Brain (2023:25). Berikut tabel menggambarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Provinsi Jambi tahun 2004-2023.

Tabel 1.3
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di
Provinsi Jambi 2004-2023.

No	Tahun	Pendapatan (Juta Rupiah)	Belanja (Juta Rupiah)	Silpa (Juta Rupiah)	
				Defisit	Surplus
1	2004	649.936	660.930	10.993	-
2	2005	748.821	642.833	-	105.988
3	2006	894.925	1.156.843	261.918	-
4	2007	1.155.351	1.105.388	-	49.963
5	2008	1.436.381	1.404.982	-	31.399
6	2009	1.353.900	1.530.073	176.173	-
7	2010	1.304.935	1.504.838	199.903	-
8	2011	2.078.807	2.432.067	353.260	-
9	2012	2.654.694	3.287.095	632.401	-
10	2013	2.886.305	3.577.072	690.767	-
11	2014	2.981.991	3.265.320	283.328	-

12	2015	3.129.719	3.604.245	474.526	-
13	2016	3.203.974	3.381.885	177.910	-
14	2017	4.305.265	4.583.486	278.221	-
15	2018	4.412.465	4.869.537	457.072	-
16	2019	4.575.193	5.244.690	669.497	-
17	2020	4.400.624	4.802.948	402.323	-
18	2021	4.294.675	4.534.149	239.474	-
19	2022	4.705.588	4.772.689	67.101	-
20	2023	4.909.073	5.501.684	592.610	-
Rata-Rata		2.804.131	3.093.137	351.028	62.450

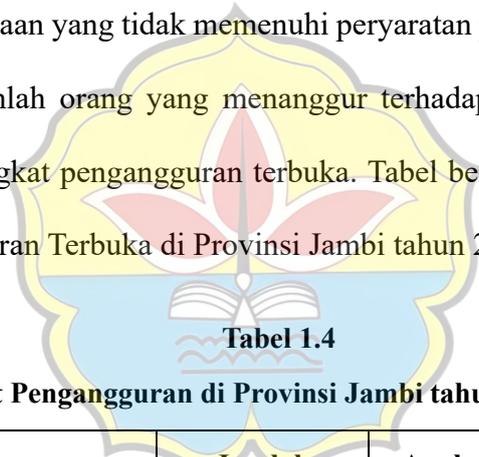
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024

Keterangan : % Perkembangan

Berdasarkan tabel 1.3, tahun 2004-2023 telah menggambarkan realisasi APBD yang mengalami perubahan atau fluktuasi. Pada tahun 2004 merupakan tahun dengan angka realisasi anggaran yang paling kecil selama 20 tahun terakhir, yakni sebesar Rp 649.936. Angka ini merupakan kondisi ekonomi dan kapasitas fiskal Provinsi Jambi yang masih terbatas. Sebaliknya, pada tahun 2023, realisasi anggaran yang mempunyai angka yang paling tinggi selama 20 tahun terakhir yaitu sebesar Rp 5.433.538, jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2004. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal kapasitas fiskal dan peningkatan kebutuhan pembangunan.

Pengangguran Terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara

lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Masalah pengangguran ini bukanlah masalah baru, itu mempengaruhi hampir semua provinsi di Indonesia, termasuk Jambi. Salah satu provinsi yang menghadapi masalah ekonomi adalah Jambi yang memiliki tingkat pengangguran sangat penting untuk menentukan apakah kemajuan ekonomi berhasil atau gagal. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka akan menimbulkan ketimpangan dari segi ekonomi. Maka karena tingkat pengangguran berfungsi sebagai ukuran seberapa sejahtera masyarakat. Pengangguran terbuka di Jambi merupakan persoalan yang pelik karena dapat berdampak pada beberapa persoalan yang saling berkaitan. Kurangnya pekerjaan atau tawaran pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan menyebabkan pengangguran. Jumlah orang yang menanggung terhadap seluruh angkatan kerja dikenal sebagai tingkat pengangguran terbuka. Tabel berikut ini menggambarkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi tahun 2009 -2023.



Tabel 1.4
Tingkat Pengangguran di Provinsi Jambi tahun 2009 - 2023.

NO	TAHUN	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	Angkatan Kerja (Jiwa)	Perkembangan pengangguran (%)
1	2004	6,04	73.108	1.137.460	-
2	2005	10,74	133.964	1.247.114	83,24
3	2006	6,62	78.264	1.181.650	(41,58)
4	2007	6,22	76.090	1.222.951	(2,78)
5	2008	5,14	66.371	1.290.854	(12,77)
6	2009	5,54	73.904	1.334.496	11,35

7	2010	5,08	83.278	1.545.683	12,68
8	2011	4,02	60.169	1.482.335	(27,75)
9	2012	3,22	42.296	1.494.974	(29,70)
10	2013	4,84	70.361	1.467.007	66,35
11	2014	5,08	79.784	1.570.822	13,39
12	2015	4,34	70.349	1.620.752	(11,83)
13	2016	4,00	67.671	1.692.193	(3,81)
14	2017	3,87	66.816	1.724.633	(1,26)
15	2018	3,86	69.075	1.791.899	3,38
16	2019	4,19	73.965	1.683.575	7,08
17	2020	5,13	93.990	1.739.033	27,07
NO	TAHUN	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	Angkatan Kerja (Jiwa)	Perkembangan pengangguran (%)
18	2021	5,09	93.754	1.840.594	(0,25)
19	2022	4,59	86.459	1.884.278	(7,78)
20	2023	4,53	85.579	1.887.840	(1,02)
Rata-rata		38,90	77,262	1.542.007	4,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024.

Keterangan : () Negatif.

% Perkembangan

Pada Tabel 1.4, Tahun 2004-2023 telah menggambarkan jumlah pengangguran yang mengalami perubahan atau berfluktuasi. Berbagai faktor ekonomi, sosial dan kebijakan pemerintah mempengaruhi jumlah pengangguran dari tahun ke tahun. Secara umum, tahun 2005 sebagai angka yang tahun dengan jumlah pengangguran tertinggi dan tahun 2012 sebagai tahun dengan angka pengangguran terendah. Pada tahun 2005, angka pengangguran berada pada angka

tertinggi dari faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja, pada tahun itu pengangguran mencapai angka 133.964 jiwa dengan persentase 83,24%. Sedangkan, pada tahun 2012, pemerintah Provinsi Jambi berhasil menekan angka pengangguran hingga mencapai titik terendah dengan angka 42.296 jiwa dan persentasenya -29,70%, yang menandakan adanya perbaikan ekonomi dan keberhasilan kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang di temukan di atas dapat di Identifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka dari tahun 2004-2023 mengalami fluktuasi di Provinsi Jambi.
2. Jumlah Penduduk dari tahun 2004-2023 mengalami fluktuasi di Provinsi Jambi.
3. Tingkat Pendidikan dari tahun 2004-2023 mengalami fluktuasi cenderung menurun di Provinsi Jambi.
4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2004-2023 mengalami fluktuasi di Provinsi Jambi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD secara simultan terhadap perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD secara simultan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

1.5 Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka dari itu diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Untuk Akademisi

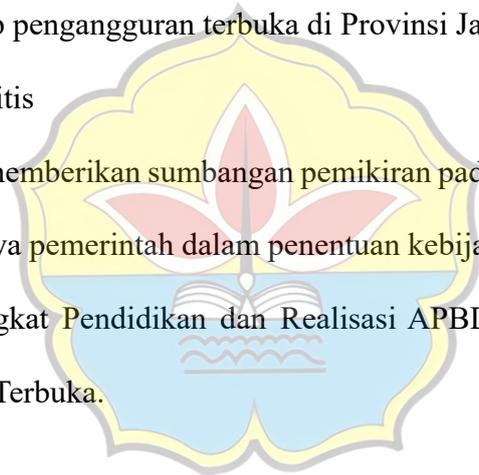
Diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian serta perkembangan dinamika teori ekonomi khususnya yang berhubungan dengan pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD terhadap masalah Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

b. Untuk Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Jambi sebagai gambaran dan informasi untuk keperluan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

c. Untuk Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah atau instansi terkait, khususnya pemerintah dalam penentuan kebijakan dalam bidang Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD dalam masalah Tingkat Pengangguran Terbuka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Ekonomi Pembangunan

Pengertian secara umum pembangunan ekonomi menurut Khotami (2019:6) merupakan suatu cabang ilmu dari ekonomi yang mengkaji masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berkembang dan meningkat.

Menurut Fitri (2022:23) dalam Ekonomi Pembangunan tidak selamanya berbicara mengenai alokasi sumber daya, tetapi berbicara juga mengenai kebijakan pemerintah baik ekonomi maupun non ekonomi. Hal ini melibatkan variabel ekonomi makro seperti pendapatan, investasi, kesempatan kerja dan gabungan faktor-faktor non ekonomi seperti sumber daya efisien. Ekonomi pembangunan dahulu didefinisikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat mengalami kenaikan dalam kurun waktu yang panjang.

2.1.1.2 Teori Ekonomi Pembangunan

Menurut Sukirno (2019:423) dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan

produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai.

Menurut Sukirno (2019:423) pertumbuhan ekonomi mempunyai mempunyai perbedaan dengan pembangunan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sama-sama menerangkan tentang perkembangan ekonomi tetapi istilah ini kadang digunakan sebagai ungkapan yang umum menggambarkan tingkat pembangunan suatu daerah yang diukur melalui indeks pendapatan nasional. Sedangkan pembangunan sering dikaitkan dengan perkembangan disuatu wilayah tertentu.

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Selain berkaitan dengan pengalokasian sumber daya produktif yang langka secara efisien dan keberlangsungan pertumbuhan sumber daya itu di masa depan, bidang studi ini juga harus berhubungan dengan mekanisme ekonomi, sosial, politik dan lembaga baik publik maupun swasta yang diperlukan untuk menghasilkan peningkatan standar hidup secara cepat dan berskala besar dari kaum miskin di negara-negara berkembang.

2.1.2 Tingkat Pengangguran

2.1.2.1 Pengertian Pengangguran

Menurut Sukirno (2019:327) Pengangguran adalah masalah ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat. Masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi politik dan sosial. Untuk masalah ini yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk baik terhadap perekonomian, individu dan masyarakat, seperti tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan masyarakat tidak dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga timbul kemiskinan, kejahatan, dan masalah sosial lainnya. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan kerja tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran.

Secara umum pengangguran diartikan dengan keadaan yang menunjukkan sumber daya yang tidak efisien digunakan. Dilihat terhadap sumber daya yang menganggur lebih ditujukan pada tenaga kerja atau buruh. Hal ini sangat beralasan karena menurut para ahli ekonomi bahwa statistik pengangguran tenaga kerja adalah yang lebih wajar sebagai indikator yang dapat dipercaya dari jumlah pengangguran. Biaya pengangguran biasa lebih nyata dan dramatis dari pada jenis biaya lain selain pengangguran tenaga kerja.

Menurut Mankiw (2018:118) Pengangguran merupakan orang yang ingin bekerja namun tidak dapat memperoleh pekerjaan tidak berkontribusi terhadap produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Meskipun tingkat pengangguran tertentu tidak dapat dihindari dalam suatu perekonomian yang kompleks dengan ribuan perusahaan dan jutaan pekerjaan, jumlah pengangguran di berbagai periode dan negara sangat beragam.

Menurut Naf'an (2022:111) Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran juga bisa terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menanggur. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat membawa berbagai

dampak pada proses pembangunan ekonomi. Agar tidak terus berlanjut, pemerintah harus segera mengatasi masalah pengangguran karena masalah pengangguran adalah masalah yang sangat mendasar dan sensitif bagi kestabilan ekonomi dan keamanan suatu negara. Naf'an (2022:112).

2.1.2.2 Jenis – Jenis Pengangguran

Pengangguran berdasarkan penyebabnya dalam penggolongan ini sukirno (2019:328) mengklasifikasikan jenis pengangguran sebagai berikut:

a. Pengangguran Normal atau Friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah di pandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau friksional. Pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja tetapi sedang mencari kerja lain yang lebih baik.

b. Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju akan ada kalanya mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh faktor berikut antara lain wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi, biaya pengeluaran sangat tinggi dan ekspor industri sangat menurun. Kemerosotan ini menyebabkan industri menurun dan sebagian besar pekerja diberhentikan dan menjadi pengangguran. Pengangguran ini digolongkan sebagai pengangguran

struktural, dinamakan demikian karena disebabkan oleh struktur kegiatan ekonomi.

c. Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini dapat ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

d. Pengangguran Silikal

Kemerosotan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran silikal.

Jenis pengangguran berdasarkan cirinya dalam penggolongan Sukirno (2019:330) mengklasifikasikan jenis pengangguran sebagai berikut:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka tercipta sebagai akibat dari penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertumbuhan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan banyak faktor. Di negara berkembang sering kali di dapati

bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya di perlukan supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

c. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau para pesawah atau petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Pengangguran ini digolongkan sebagai pengangguran musiman atau bermusim.

d. Setengah Menganggur

Di negara berkembang, migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu, selain itu yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

2.1.2.3 Faktor – Faktor Pengangguran

Beberapa faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran yaitu sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk

Menurut Sukirno (2011:91), menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat memicu tingginya angka pengangguran jika diiringi dengan peningkatan peluang kerja.

b. Tingkat Pendidikan

Menurut Mulyadi (2017:72), menjelaskan bahwa salah satu solusi utama mengatasi pengangguran di Indonesia adalah dengan memperkuat pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi memberikan keterampilan praktis yang langsung bisa diterapkan di dunia kerja. Hal ini akan mengurangi kesenjangan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, yang pada akhirnya menurunkan tingkat pengangguran.

c. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Sukirno (2013:235), membahas pentingnya pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menurunkan pengangguran. Ia berpendapat bahwa peningkatan belanja pemerintah di sektor-sektor produktif dapat merangsang permintaan agregat, yang akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

2.1.2.4 Teori-Teori Pengangguran

Teori-teori pengangguran dapat dijelaskan melalui beberapa teori yang ada berikut merupakan teori mengenai pengangguran. Dermawan (2021:31) sebagai berikut:

a. Teori Keynesian

Pendapat teori Keynes tentang pengangguran ialah adanya pengangguran diakibatkan oleh rendahnya permintaan agregat. Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi yang mengalami kelambatan disebabkan oleh rendahnya konsumsi, melainkan bukan karena produksi yang rendah. Permasalahan ini tidak dapat dikaitkan dengan mekanisme pasar bebas. Meningkatnya tenaga kerja, nilai upah akan mengalami penurunan sehingga merugikan karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang. Akibatnya produsen tidak mampu menyerap tenaga kerja.

b. Teori Klasik

Teori klasik berpendapat bahwa pengangguran terjadi karena upah terlalu tinggi. Menurut teori ini, jika upah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan cepat, maka pasar tenaga kerja akan selalu berada dalam kondisi keseimbangan. Pengangguran yang ada dianggap sebagai fenomena sementara yang akan diselesaikan dengan penurunan upah.

Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah mendapatkan

tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

2.1.3 Jumlah Penduduk

2.1.3.1 Pengertian Jumlah Penduduk

Menurut Fitri (2022:23) dalam Ekonomi Pembangunan tidak selamanya berbicara mengenai alokasi sumber daya, tetapi berbicara juga mengenai kebijakan pemerintah baik ekonomi maupun non ekonomi. Hal ini melibatkan variabel ekonomi makro seperti pendapatan, investasi, kesempatan kerja dan gabungan faktor-faktor non ekonomi seperti sumber daya efisien. Ekonomi pembangunan dahulu didefinisikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat mengalami kenaikan dalam kurun waktu yang panjang.

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang di tambah dengan suatu perubahan. Literatur ekonomi pada umumnya mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang di gambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu yang apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Sukirno (2019,49). Secara umu, pertumbuhan ekonomi ini dapat digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi di negara maju. Pembangunan ekonomi dapat diwujudkan jika salah satu syaratnya terpenuhi, yakni ketika tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari tingkat pertambahan penduduk. Dalam proses pembangunan ekonomi harus mampu di imbangi dengan pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk berbeda dengan pembangunan ekonomi karena pertumbuhan penduduk lebih melihat dari aspek kuantitatif serta variabel-variabel

ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan tujuan hasil dalam suatu kegiatan ekonomi. Pertumbuhan yang ditingkatkan hanya jumlah besaran produksi tanpa memandang bagaimana sebaran dan kontribusi kelompok masyarakat atau individu yang terlibat, Fitri (2022:26).

Pertumbuhan penduduk adalah istilah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah pada masa yang akan datang. Dengan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk yang akan datang, diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga di bidang politik. Prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk di masa yang akan datang.

Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah (bertambah atau berkurang) seiring dengan perjalanan waktu. Pertambahan penduduk terjadi karena angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang, dimana angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang, dimana angka kelahiran lebih besar dari angka kematian. Pertambahan penduduk juga dipengaruhi selisih angka penduduk yang masuk dan keluar suatu wilayah. Pertambahan penduduk suatu wilayah berubah angka-angka yang kongkret dalam pertambahan setiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan penduduk berupa besaran persentasenya saja.

Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan baru. Bidarti (2020:184).

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tiga komponen yaitu: Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi. Salah satu faktor yang menetapkan keberhasilan pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan itu sendiri, namun demikian penduduk Indonesia menurut strukturnya berbeda dengan negara yang lebih maju. Struktur penduduk Indonesia dikatakan masih muda, atau sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda. Di kalangan para pakar pembangunan telah ada consensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumber daya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, yaitu:

1. Banyak negara yang penduduknya masih sangat bergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumber daya alam yang langka.
2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa yang akan datang menjadi tinggi. Rendahnya sumber

daaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.

3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang di butuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi social. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat.

2.1.3.2 Teori-Teori Jumlah Penduduk

Ada beberapa teori yang membahas tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap jumlah pengangguran terbuka menurut beberapa ahli ekonomi:

1. Menurut Sukirno (2011:89), menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat memicu tingginya angka pengangguran jika tidak diiringi dengan peningkatan peluang kerja, namun jika ekonomi tidak berkembang dengtan cukup cepat untuk menciptakan lapangan kerja baru, maka pengangguran akan meningkat.
2. Menurut Todaro (2006:351), mengemukakan bahwa pengangguran dapat timbul akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Pada negara berkembang, seperti Indonesia, pertumbuhan penduduk sering kali lebih cepat daripada kemampuan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja.
3. Menurut Mankiw (2013: 145), mankiw membahas konsep pengangguran dari sudut pandang makroekonomi dan bagaiman jumlah penduduk mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Pada pandangan mankiw

diterapkan untuk menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk tanpa peningkatan lapangan pekerjaan yang memadai akan memperbesar angka pengangguran struktural.

2.1.4 Tingkat Pendidikan

2.1.4.1 Pengertian Tingkat Pendidikan

Pengertian pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang maksimal. Pendidikan juga mengartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Nurhuda (2022:4).

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dari negara. Hal senada juga di sampaikan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang panjang untuk belajar bagaimana bernegosiasi dengan dunia luar. Proses belajardialami manusia sejak Ia dilahirkan. Seorang bayi pada awal dilahirkan biasanya didahului dengan

menangis. Ia kaget bahwa dunia yang barunya tidak (sama) sejuk seperti dunianya (dalam rahim ibu). Lingkungan barunya sangat tidak nyaman seperti dalam perut ibunya. Ia harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan dunia luar dan lingkungan barunya. Pendidikan sebagai pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap di dalam kebiasaan-kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya dan sikapnya Thomson dalam seran (2016:7).

2.1.4.2 Jenjang Pendidikan

Menurut Candra (2019:135) jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun tiga(3) jenjang pendidikan tersebut sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar bagaimana kehidupan baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi.

Menurut Candra (2019:135) menjelaskan tentang jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, terdiri dari:

- a. Pendidikan formal dalam perkataan formal terdapat kata form atau bentuk. Pendidikan formal adalah pendidikan yang mempunyai bentuk atau organisasi tertentu, seperti terdapat di sekolah atau universitas.
- b. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di rumah atau dalam lingkungan keluarga. Pendidikan ini berlangsung tanpa organisasi, yakni tanpa orang tertentu yang diangkat atau ditunjuk, tanpa suatu program yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, tanpa suatu program yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, tanpa evaluasi yang formal berbentuk ujian. Namun pendidikan informal sangat penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Pengaruh orang tua, orang-orang lain ditemui anak dalam pergaulan sehari-hari dapat menentukan sikap dan nilai-nilai yang

dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya. Pendidikan semacam ini tidak mengenal batas waktu berlangsung sejak anak lahir hingga akhir hidupnya.

- c. Pendidikan non formal meliputi berbagai usaha khusus yang diselenggarakan secara terorganisir agar terutama generasi muda dan juga orang dewasa yang tidak dapat sepenuhnya atau sama sekali tidak berkesempatan mengikuti pendidikan sekolah dapat memiliki pengetahuan praktis dan keterampilan dasar yang mereka perlukan sebagai warga masyarakat yang produktif. Dengan demikian maka pendidikan non formal tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan pendidikan formal. Pendidikan formal maupun pendidikan non formal merupakan bagian-bagian yang integral dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan formal maupun pendidikan non formal merupakan usaha integral dalam rangka pelaksanaan seumur hidup. Pendidikan non formal antara lain meliputi bidang pendidikan masyarakat, keolahragaan, kepemudaan dan kebudayaan.

Adapun kejahatan atau keburukan yang ada dalam diri manusia itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang buruk, bukan bawaan. Mengembangkan teori hirarki kebutuhan maslow, yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisiologis.

Adalah sekumpulan kebutuhan – kebutuhan dasar yang paling penting untuk segera dipenuhi karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia.

2. **Kebutuhan Keamanan.**

Adalah suatu kebutuhan yang mendorong untuk merasa aman secara fisik dan emosional di lingkungan sekolah. Lingkungan yang aman membuat siswa lebih siap untuk belajar.

3. **Kebutuhan sosial atau rasa memiliki.**

Adalah suatu kebutuhan untuk merasa diterima dalam kelompok dan memiliki relasi positif dengan guru dan teman-teman.

4. **Kebutuhan harga diri**

Adalah salah satu cara siswa untuk membutuhkan penghargaan dan pengakuan atas pencapaian mereka. Mereka perlu merasa dihargai dan percaya diri dalam belajar.

5. **Kebutuhan akuntabilitas diri**

Adalah tingkat tertinggi dimana siswa mencapai potensi mereka dan merasa terpenuhi dalam pembelajaran.

Dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang berkelanjutan dan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas 2003, Tingkat pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Iswan (2018:94)

2.1.4.3 Teori Tingkat Pendidikan

Beberapa ahli ekonomi Indonesia yang membahas tentang pendidikan terhadap pengangguran, sebagai berikut:

1. Menurut Sukirno (2008:150), ia menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh besar dalam menurunkan tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keterampilannya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan keterampilan, kemampuan berpikir, dan daya saing tenaga kerja berpendidikan tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja berpendidikan rendah.
2. Menurut Darmawan (2015:165), menyatakan bahwa pengangguran struktural di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kesenjangan antara sistem pendidikan dan permintaan tenaga kerja. Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya menyiapkan lulusan untuk menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi, yang mengakibatkan banyak lulusan yang tidak siap untuk bekerja di sektor-sektor industri modern.
3. Menurut Mulyadi (2017:72), menjelaskan bahwa salah satu solusi utama untuk mengatasi pengangguran di Indonesia adalah dengan memperkuat pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi memberikan keterampilan praktis yang langsung bisa diterapkan di dunia kerja. Hal ini akan mengurangi kesenjangan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, yang pada akhirnya menurunkan tingkat pengangguran.

2.1.5 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.5.1 Pengertian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mahmudi (2016:67) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan berdasarkan persatuan daerah. APBD mencerminkan keseluruhan rancangan penerimaan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. APBD disusun sebagai instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan tahapan pelaksanaan anggaran yang mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD telah dilaksanakan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Realisasi APBD melibatkan pengelolaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan daerah yang telah direncanakan, serta pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh belanja daerah. Proses realisasi ini penting karena menunjukkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang direncanakan.

Realisasi APBD juga menjadi instrumen akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kepada masyarakat, karena melalui laporan realisasi APBD, masyarakat dapat menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk membangun dan pelayanan publik.

Komponen Realisasi APBD terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu:

1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan yang sah. Proses realisasi pendapatan daerah melibatkan pemungutan atau penerimaan kas yang telah direncanakan. Realisasi pendapatan daerah melibatkan pemungutan atau penerimaan kas yang telah direncanakan. Realisasi juga mencerminkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan sumber-sumber keuangannya. Apabila realisasi pendapatan lebih rendah dari yang dianggarkan, ini dapat mengindikasikan masalah dalam pemungutan pajak atau pengelolaan sumber daya keuangan lainnya.

2. Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik yang ditetapkan dalam APBD. Realisasi belanja biasanya dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

- a. Belanja Langsung adalah pengeluaran yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu, contohnya pelayanan kesehatan.
- b. Belanja Tidak Langsung adalah hal yang mencakup pengeluaran yang tidak secara langsung terkait dengan kegiatan spesifik, contohnya gaji pegawai.

Tingkat realisasi belanja mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Apabila belanja tidak terealisasi sesuai rencana, hal ini dapat mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program, seperti keterlambatan administrasi. Mahmudi (2016:231).

2.1.5.2 Tujuan dan Tantangan Realisasi APBD

Menurut Saragih (2016:149) Realisasi APBD memiliki tujuan dan tantangan untuk menghadapi adanya Realisasi APBD, diantaranya :

1. Tujuan Realisasi APBD

- a. Mewujudkan rencana pembangunan daerah : Realisasi APBD menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mendukung akuntabilitas keuangan : pelaksanaan anggaran yang baik dan transparan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
- c. Menjaga keseimbangan fiskal daerah : Realisasi APBD tetap dalam batas-batas yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah.

2. Tantangan Realisasi APBD

- a. Keterbatasan kapasitas administratif : kinerja aparatur daerah yang belum optimal sering kali menghambat realisasi anggaran, terutama

dalam hal pengadaan barang dan jasa, pencairan dana, serta manajemen proyek.

- b. Faktor eksternal : seperti perubahan kondisi ekonomi makro yang memengaruhi penerimaan daerah, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, serta fluktuasi harga komoditas yang dapat mempengaruhi pendapatan dari sektor tertentu.
- c. Perencanaan yang tidak matang : perencanaan anggaran yang kurang detail atau tidak didukung dengan analisis yang memadai juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan APBD.

2.1.5.3 Teori-Teori Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan teori tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap jumlah pengangguran terbuka dari beberapa ahli ekonomi, sebagai berikut:

1. Menurut Sukirno (2015: 89), menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang efektif dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesempatan kerja. Dengan alokasi anggaran yang tepat, seperti investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya menurunkan tingkat pengangguran.
2. Menurut Mardiasmo (2009:120), ia menjelaskan bahwa salah satu fungsi APBD adalah sebagai instrumen distribusi ekonomi. Ketika pemerintah daerah merealisasikan belanja yang produktif seperti pembangunan

infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, ini akan membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Namun, jika realisasi APBD lebih banyak dihabiskan untuk belanja yang produktif, seperti belanja pegawai yang berlebihan, dampak terhadap pengangguran akan minim.

3. Menurut Basri (2016:150), berpendapat bahwa APBD yang dialokasikan pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri kecil dan menengah, serta proyek padat karya, dapat membantu mengurangi pengangguran. Mereka menekankan bahwa anggaran pemerintah yang tepat sasaran akan memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.

2.1.6. Hubungan Antar Variabel

2.1.6.1 Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka.

Menurut Sukirno (2011:91), Kenaikan jumlah penduduk yang dialami di suatu wilayah mengakibatkan kenaikan pada jumlah angkatan kerja di wilayah tersebut. Akan tetapi, kenaikan jumlah angkatan kerja dan pada akhirnya jumlah angkatan kerja yang bertambah tersebut tidak dapat di distribusikan secara keseluruhan ke lapangan pekerjaan. Hal ini akan berdampak pada jumlah pengangguran yang semakin meningkat.

Pengangguran penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang dialami disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya.

Semakin maraknya pertumbuhan penduduk disuatu wilayah maka akan semakin banyak pula masyarakat yang menganggur atau yang tidak memiliki pekerjaan karena lapangan yang tercipta tidak memenuhi syarat untuk jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya.

Hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka itu sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu ekonomi, sosial dan kebijakan. Salah satu faktor nya sebagai berikut:

1. Persaingan Pekerjaan

Dengan banyak nya jumlah penduduk yang melebihi jumlah pekerjaan yang tersedia (tingkat pengangguran) maka tingkat pengangguran terbuka cenderung naik karena persaingan untuk pekerjaan lebih keras.

2. Pertumbuhan Ekonomi:

Tingkat pengangguran terbuka dapat menurun saat ekonomi tumbuh dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

3. Kebijakan Ketenagakerjaan:

Kebijakan pemerintah terkait dengan pasar tenaga kerja, seperti pelatihan keterampilan, insentif untuk penciptaan lapangan kerja, atau perlindungan sosial, dapat mempengaruhi tingkat pengangguran.

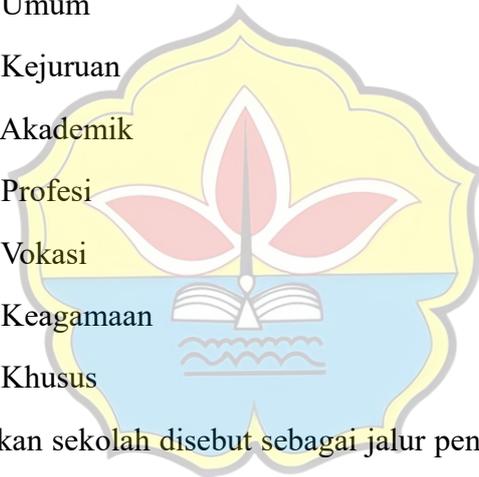
2.1.6.2 Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka

Menurut Sukirno (2019), pendidikan berperan penting dalam mengurangi jumlah pengangguran terbuka. Pendidikan meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan, yang dapat memperluas kesempatan kerja dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan yang tidak terampil. Namun, ketidaksesuaian antara pendidikan yang ditempuh dan kebutuhan lapangan kerja dapat menyebabkan pengangguran, terutama orang-orang yang baru lulus dari pendidikan.

Teori menurut Candra (2019), menegaskan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur: Jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Jenjang pendidikan formal meliputi: pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan jenis pendidikan mencakup:

- a) Pendidikan Umum
- b) Pendidikan Kejuruan
- c) Pendidikan Akademik
- d) Pendidikan Profesi
- e) Pendidikan Vokasi
- f) Pendidikan Keagamaan
- g) Pendidikan Khusus



Jalur pendidikan sekolah disebut sebagai jalur pendidikan formal. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses belajarmengajar dilakukan atas dasar ketentuan yang berlaku dan berlangsung secara teratur.

Selanjutnya, menjelaskan bahwa teori dan konsep dari kedua macam pendekatan tersebut saling bertolak belakang. Konsep tentang pengetahuan misalnya, pendekatan behavioristic berpendapat bahwa pengetahuan adalah objektif, pastidan tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi,

tetapi oleh pendekatan konstruktivistik berpendapat bahwa pengetahuan adalah non objektif, temporer, selalu berubah dan tidak menentu.

Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat pengangguran terbuka adalah kompleks dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mendapatkan pekerjaan dan tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam hubungan ini yaitu:

1. Kesesuaian Kualifikasi:

Orang dengan pendidikan formal yang lebih tinggi umumnya memiliki kualifikasi dan keterampilan yang lebih baik, yang membuat mereka lebih mudah untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tertentu. Ini dapat mengurangi kemungkinan mereka mengalami pengangguran.

2. Keterampilan dan Adaptabilitas:

Pendidikan yang lebih tinggi sering dikaitkan dengan keterampilan yang lebih baik dalam hal komunikasi, analisis, dan berpikir kritis. Ini dapat membantu individu lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pasar kerja dan permintaan pekerjaan yang baru.

3. Tingkat Partisipasi dalam Pendidikan Lanjutan:

Orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mungkin untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti pelatihan lanjutan, yang bisa meningkatkan kesempatan mereka di pasar kerja.

4. Perubahan Teknologi dan Ekonomi:

Adopsi teknologi dan perubahan dalam struktur ekonomi juga dapat mempengaruhi bagaimana tingkat pendidikan berkontribusi terhadap tingkat pengangguran. Misalnya, perubahan teknologi mungkin memerlukan keterampilan baru yang dapat dipelajari melalui pendidikan tambahan.

2.1.6.3 Hubungan Realisasi APBD dengan Jumlah Pengangguran Terbuka

Menurut Mardiasmo (2015:155) Realisasi APBD yang efisien dan efektif sangat penting dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. APBD yang direalisasikan melalui program-program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperkuat sektor UMKM, berperan penting dalam mengurangi pengangguran. Realisasi APBD memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pengangguran terbuka karena belanja daerah, khususnya yang langsung diarahkan ke sektor-sektor strategis, dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kemampuan daya asing tenaga kerja melalui berbagai program pembangunan yang akan dibuat.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan proposal ini peneliti mencoba menggali dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu mengenai pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi APBD terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

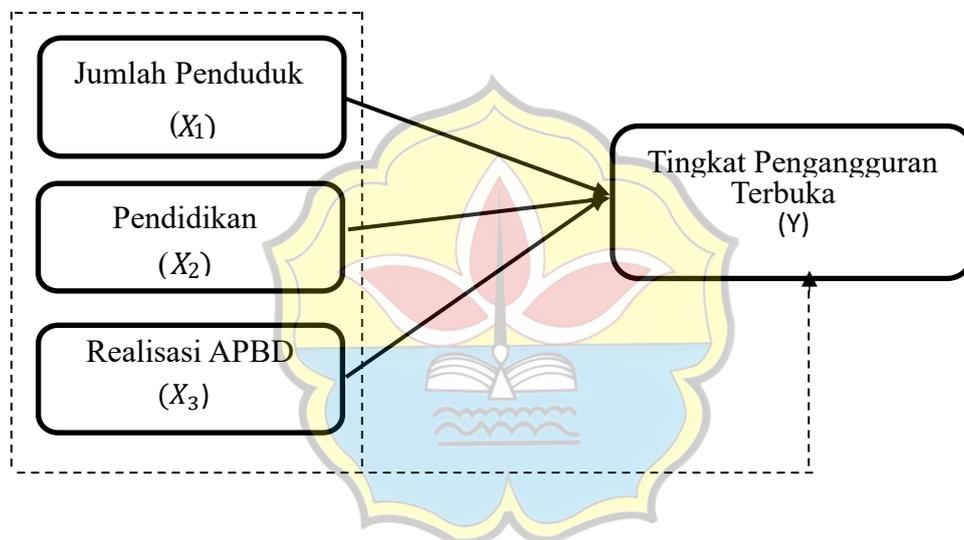
No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Teresa v.Tumilaar, Mauna Th. B. Maramis, Hanly F. Dj. Siwu. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 22 No. 5 (2022)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel jumlah penduduk dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. 2. variabel pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Ayu Siti Patim, Hardiani Hardiani, Etik Umiyati. Jurnal Ekonomi Aktual. Vol.1 No. 3 (2022).	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penduduk dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengangguranterbuka di Provinsi Jambi 2. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jambi
3.	Syurifto Prawira. Jurnal Ecogen. Vol. 1 No. 1 (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. 2. Variabel upah minimum dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

4.	Savira Apriliana, Riko Setya Wijaya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 24 No. 1 (2024)	Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel kemiskinan dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. 2. Variabel pertumbuhan penduduk dan upah secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.
5.	Irma Yuni Astuti, Nanik Istiyani, Lilis Yuliati, Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen. Vol. 18 No. 1 (2019).	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. 2. Pertumbuhan penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

2.1.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesis berdasarkan tinjauan teori dalam penelitian terdahulu yang menggambarkan keterkaitan antar indikator yang teliti. Hal ini merupakan tuntutan penelitian dalam memecahkan masalah penelitian dengan menggunakan bagan alur disertai penjelasan. Penduduk adalah orang-orang yang berada pada suatu wilayah yang terkait oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus.

Pendidikan yaitu suatu proses pembelajaran pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang dilihat dari kebiasaan setiap orang, yang menjadi bahan warisan dari orang sebelumnya hingga sekarang. Pendidikan suatu usaha sadar dengan cara yang sistematis dan dinamis. Serta Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan proses pelaksanaan rencana anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini sebagai tujuan mewujudkan pembelajaran serta meningkatkan potensi dari setiap peserta didik.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

----- : Pengaruh Simultan

—————▶ : Pengaruh Parsial

X1: Jumlah Penduduk sebagai variabel bebas atau independent yang dapat mempengaruhi variable Y yaitu Pengangguran sebagai variabel terikat dependen.

X2: Pendidikan sebagai variabel bebas atau independent yang dapat mempengaruhi variabel Y yaitu Pengangguran sebagai variabel terikat dependen.

X3: Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai variabel bebas atau independent yang dapat mempengaruhi variabel Y yaitu Pengangguran sebagai variabel terikat dependen.

2.1.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran teoritis diatas, hipotesis dari penelitian ini ditabulasikan sebagai berikut:

1. Diduga jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengangguran di Provinsi Jambi tahun 2004-2023.
2. Diduga jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran dan pendapatan daerah (APBD) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengangguran di Provinsi Jambi tahun 2004-2023.

2.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang memberikan penjelasan hubungan antara variabel berdasarkan data yang diukur dalam suatu skala numerik yang berfungsi untuk membuat gambaran fakta-fakta ada berdasarkan teori-teori di dalam literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2.2.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan yaitu berupa data times series selama 15 tahun di Provinsi Jambi dari 2004-2023. Sumber data yang diperoleh yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi. Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1. Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi tahun 2004-2023 diperoleh dari BPS Provinsi Jambi.
2. Data Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi tahun 2004-2023 diperoleh dari BPS Provinsi Jambi.
3. Data Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Jambi tahun 2004-2023 diperoleh dari BPS Provinsi Jambi.
4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Jambi tahun 2004-2023 diperoleh dari BPS Provinsi Jambi.

2.2.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Metode studi pustaka ini dilakukan untuk memahami literature yang berkaitan dengan pembahasan yaitu dengan cara mengklasifikasikan bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2004-2023. Pengumpulan data pada penelitian ini juga didapat dari jurnal, buku-buku dan internet.

2.2.3 Metode Analisis

1. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda dan metode yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau Method of Ordinary Least Square (OLS) sedangkan operasional pengolahan data dilakukan dengan software SPSS.

Metode OLS mempunyai beberapa keunggulan yang secara teknis sangat mudah dalam penarikan interpretasi dan perhitungan penaksiran BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Menurut Rifkhan (2023:98). Bentuk umum persamaan dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen

α = Konstanta

X_1 = Variabel Independen

X_2 = Variabel Independen

X_3 = Variabel Independen

β_1 = Koefisien Independen X_1

β_2 = Koefisien Independen X_2

β_3 = Koefisien Independen X_3

e = Kesalahan random (error)

Karena untuk mencapai hasil yang lebih bagus dan konsisten dalam data variabel, kita dapat mengaplikasikan teknik perbaikan data. Teknik ini tidak

hanya membantu mengurangi fluktuasi yang tidak diinginkan, tetapi juga meningkatkan kualitas interpretasi dengan satuan yang berbeda atau variatif dapat di estimasikan bahwa persamaan ini menggunakan LOG sebagai berikut . Maka dalam penelitian ini dijadikan sebagai berikut:

$$\text{Log}Y = \alpha + \beta_1 \text{Log}X_1 + \beta_2 \text{Log}X_2 + \beta_3 \text{Log}X_3 + e$$

Keterangan :

LogY	=	Tingkat Pengangguran Terbuka
α	=	Konstanta
Log X_1	=	Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi
Log X_2	=	Pendidikan di Provinsi Jambi
Log X_3	=	Realisasi APBD di Provinsi Jambi
β_1	=	Koefisien Regresi Jumlah Penduduk
β_2	=	Koefisien Regresi Pendidikan
β_3	=	Koefisien Regresi Realisasi APBD
e	=	Kesalahan random (error)

2.2.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukam pengujian terhadap hipotesis yang diajukan akan dilakukan pengujian penyimpangan asumsi klasik. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model yang akan digunakan dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari penyimpangan asumsi klasik.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki

berdistribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Syarat pengambilan keputusan uji normalitas:

1. Jika nilai signifikan (Sig.) > dari 0,05 maka data penelitiannya dikatakan berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikan (Sig.) < dari 0,05 maka data penelitiannya dikatakan tidak berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2018: 137) Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual satu pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Terdapat berbagai macam uji statistik yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu model terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak, seperti misalnya uji Park, uji Glejser, uji White dan lain-lain.

1. Apabila hasil uji di atas level signifikansi ($r > 0,05$) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Apabila di bawah level signifikansi ($r < 0,05$) berarti terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross section, dimana data panel lebih dekat ke ciri data panel lebih ke ciri data cross section dibandingkan time series.

c. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018:107) Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat kolerasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel independen saling berkolerasi sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi sebagai berikut:

- a. Menganalisis matrik kolerasi variabel independen. Jika antar variabel independen ada kolerasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
- b. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.
- c. Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 , maka ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi linear terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokolerasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk data time series autokolerasi sering terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya crosssection jarang terjadi karena variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Durbit Watson

Jika	Hipotesis Nol	Keputusan
$0 < d < d_1$	Tidak ada autokolerasi positif	Tolak
$d_1 \leq d \leq d_u$	Tidak ada autokolerasi positif	No desicion
$4 - d_1 < d < 4$	Tidak ada kolerasi negatif	Tolak
$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_1$	Tidak ada kolerasi negatif	No desicion
$d_u < d < 4 - d_u$	Tidak ada autokolerasi positif, negatif	Tidak ditolak

2.2.5 Uji Hipotesis

1. Uji Secara Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2018:179) Uji F atau uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai sig > 0,05 maka dapat dinyatakan variabel- variabel tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sementara jika nilai sig < 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. Berikut tahapan melakukan uji F.

1. Menentukan F_{Tabel} dengan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel -1), df 2 ($n-k-1$), n (jumlah data), K (jumlah variabel independen).

Dalam pengujian hipotesis dengan uji-F digunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

R^2 = Koefisien Determinasi

K = Jumlah Variabel Independen

n = Jumlah Data

2. Membandingkan F_{Hitung} dengan F_{Tabel} .

Hipotesis pengujian statistik adalah sebagai berikut:

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$: tidak ada pengaruh signifikan tingkat partisipasi jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara simultan terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq 0$: Ada pengaruh signifikan tingkat partisipasi jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

Pengambilan kesimpulan adalah dengan melihat α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika $F_{Hitung} > F_{Tabel}$, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

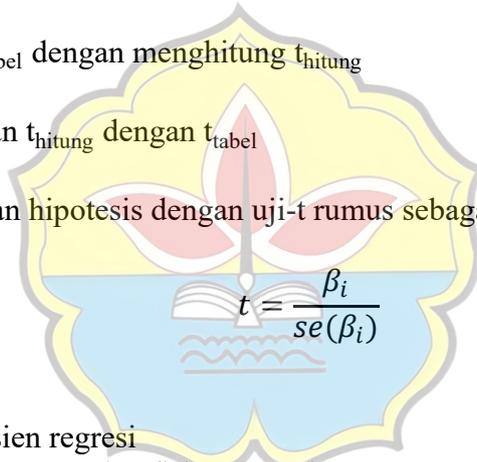
2. Jika $F_{Hitung} < F_{Tabel}$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

2. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018:179) Uji t atau uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah uji t sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat signifikan sebesar 0,05 t_{hitung} = koefisien regresi atau standar deviasi.
2. Menentukan t_{tabel} dengan menghitung t_{hitung}
3. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}

Dalam pengujian hipotesis dengan uji-t rumus sebagai berikut:



Dimana :

B = Koefisien regresi

Se = Standar error koefisien regresi

Hipotesis pengujian statistik sebagai berikut:

- a. $H_0 : \alpha_1 = 0$: Tidak ada pengaruh signifikan tingkat partisipasi Jumlah Penduduk, secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.
 $H_a : \alpha_1 \neq 0$: Ada pengaruh signifikan tingkat partisipasi Jumlah Penduduk, secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

b. $H_0 : \alpha_2 = 0$: Tidak ada pengaruh signifikan tingkat partisipasi Tingkat Pendidikan, secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

$H_a : \alpha_2 \neq 0$: Ada pengaruh signifikan tingkat partisipasi Tingkat Pendidikan, secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

c. $H_0 : \alpha_3 = 0$: Tidak ada pengaruh signifikan tingkat partisipasi Realisasi APBD, secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

$H_a : \alpha_3 \neq 0$: Ada pengaruh signifikan tingkat partisipasi Realisasi APBD, secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi.

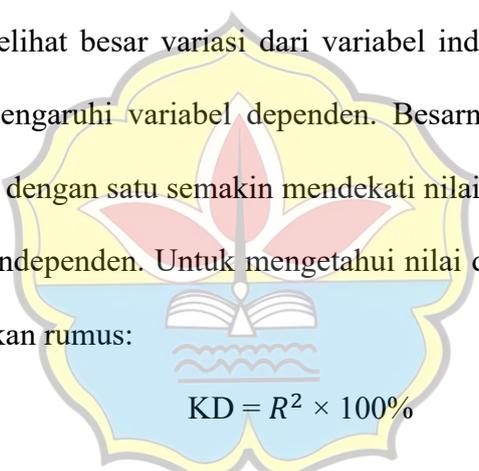
Pengambilan kesimpulan dengan melihat derajat tingkat kepercayaan α yaitu 0,05 sebagai berikut:

a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak berarti variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak berarti variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat partisipasi Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi APBD terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi tahun 2004 sampai tahun 2023 maka dilakukan uji koefisien determinasi (R^2). Menurut Ghazali (2018:97), Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan model variasi terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat besar variasi dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi berkisar nol sampai dengan satu semakin mendekati nilai satu maka semakin besar pengaruh variabel independen. Untuk mengetahui nilai dari koefisien determinasi tersebut menggunakan rumus:


$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

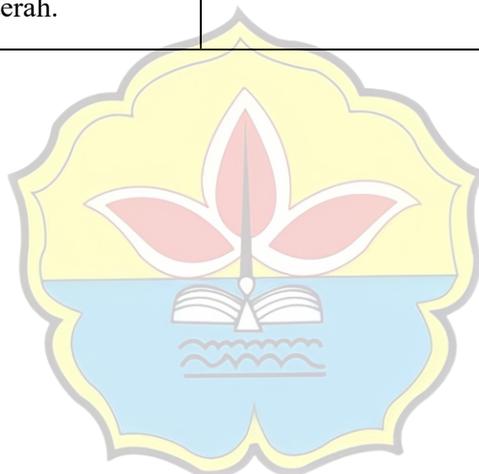
R^2 = Koefisien Kolerasi

2.2.6 Operasional Variabel

Tabel 2.3
Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Formula	Satuan
Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)	Dapat di ukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jambi.	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{angkatan Kerja}} \times 100\%$	Persen
Jumlah Penduduk (X1)	Mengukur jumlah individu yang ada dalam suatu wilayah atau populasi tertentu dengan cara penduduk yang menetap di suatu wilayah lebih dari enam bulan dan yang menetap. Data yang digunakan adalah jumlah Penduduk di Provinsi Jambi yang dinyatakan dalam satuan Jiwa.	$P_t = P_0(1 + r)^t$	Jiwa
Pendidikan (X2)	Mengukur dan mengelompokkan tingkat pendidikan individu dengan cara tingkat pendidikan menyatakan banyaknya peserta didik rata-rata lama sekolah di Provinsi Jambi.	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	Jiwa

<p>Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (X3)</p>	<p>Mengukur dan mengelompokkan Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan cara realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menyatakan dengan melaksanakan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.</p>	$\frac{\text{Realisasi APBD}}{\text{Total Anggaran APBD}} \times 100\%$	<p>Ribu Rupiah</p>
---	---	---	--------------------



BAB III

GAMBARAN UMUM PROVINSI JAMBI

3.1 Letak Geografis Provinsi Jambi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0 45'-2 45' Lintang Selatan dan 110 10'-104 55' bujur timur Provinsi Jambi di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah timur dengan laut Cina Selatan dan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah selatan Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat untuk lebih jelas bisa dilihat gambar 3.1 peta wilayah Provinsi Jambi.



Gambar 3.1 Peta Wilayah Provinsi Jambi

Dari letak geografis ini terlihat bahwa Provinsi Jambi memiliki posisi yang sangat strategis karena letak di tengah pulau Sumatera yang mempunyai hubungan terbuka dengan daerah lain. Letak geografis ini sangat menguntungkan untuk Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan ekonomi seperti produksi yang berujung pada kegiatan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri guna memacu laju pembangunan di Provinsi Jambi.

Secara administratif Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat No.19 Tahun 1957, tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No.61 Tahun 2008, tentang pembentukan Kota Sungai Penuh. Sehingga sampai saat ini, secara administratif Provinsi Jambi memiliki 9 kabupaten dan 2 Kota yang terdiri dari Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Tebo. Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh dengan luas wilayah sebagai label berikut:

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (KM ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
Provinsi Jambi	50.160,05	100
Kerinci	3.355,27	6,69
Merangin	7.679,00	15,31
Sarolangun	6.184,00	12,33
Batanghari	5.804,00	11,57
Muaro Jambi	5.326,00	10,62
Tanjung Jabung Timur	5.445,00	10,85
Tanjung Jabung Barat	4.649,85	9,27
Tebo	6.461,00	12,88
Bungo	4.659,00	9,29
Kota Jambi	205,43	0,41
Kota Sungai Penuh	391,50	0,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Jambi 2024

Berdasarkan tabel diatas luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.679 KM² atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi di ikuti oleh Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.461 KM² dan 6.184 KM², luas wilayah terkecil di Provinsi Jambi berada di Kota Jambi sebesar 205,43 KM² atau sebesar 0,41 persen dari total wilayah Provinsi Jambi di ikuti oleh Kota Sungai Penuh yaitu sebesar 39,50 KM² atau sebesar 0,78 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi.

3.2 Kondisi Geografis Provinsi Jambi

Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan namun jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitasnya maka dapat menjadi penghambat pembangunan. Oleh karena itu masalah kependudukan harus mendapat perhatian yang serius sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai modal pembangunan.

Bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu saja harus di ikuti dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kependudukan seperti masalah sosial, ekonomi dan keamanan. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi.

Dalam pembangunan ekonomi, penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena penduduk merupakan tenaga kerja yang potensial untuk pembangunan bila digunakan semaksimal mungkin. Jumlah penduduk yang cukup besar dari satu sisi dapat dijadikan modal dasar pembangunan. Banyaknya penduduk di Provinsi Jambi bukan hanya disebabkan tingginya kelahiran tetapi

juga migrasi dari luar Provinsi Jambi. Berikut tabel Jumlah Penduduk di Provinsi Jambi.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Tahun 2019-2023

Wilayah	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Jambi	3.624,6	3.677,9	3.585,1	3.631,1	3.760,2
Kerinci	238,7	250,3	251,9	253,9	255,1
Merangin	388,9	354,1	355,7	357,6	368,4
Sarolangun	301,9	290,1	293,6	298,1	302,2
Batang Hari	272,9	301,7	306,7	313,2	312,7
Muaro Jambi	443,4	402,0	406,8	412,8	418,8
Tanjung Jabung Timur	220,0	229,8	231,8	234,2	236,7
Tanjung Jabung Barat	333,9	317,5	320,6	324,5	330,5
Tebo	354,5	337,7	340,9	344,8	350,8
Bungo	374,8	362,4	367,2	373,3	376,4
Kota Jambi	604,7	606,2	612,2	619,6	627,8
Kota Sungai Penuh	90,9	96,6	97,8	99,2	99,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024

Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jambi tahun 2019 sebesar 3.624,6 ribu jiwa dan pada tahun 2020 penduduk Provinsi Jambi menurun kemudian naik kembali pada tahun 2023 sebesar 3.760,2 ribu jiwa. Ini disebabkan banyaknya angka kematian, angka kelahiran dan migrasi menjadi

penyebab bertambah jumlah penduduk di Provinsi Jambi. Jumlah penduduk tertinggi terdapat pada Kota Jambi sebesar 619,6 ribu jiwa pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 627,8 ribu jiwa, Kota Sungai Penuh memiliki jumlah penduduk terendah pada tahun 2019 sebesar 90,9 ribu jiwa dan pada tahun 2020 sebesar 96,6 ribu jiwa.

3.3 Demografi Provinsi Jambi

Provinsi Jambi dihuni oleh bermacam-macam suku bangsa, memiliki kekayaan budaya beragam etnis, dan masyarakat Melayu Jambi pun merupakan bangunan dari berbagai suku, seperti Minangkabau, Bugis, Banjar, Palembang dan Jawa. Penduduk daerah Merangin dan Sarolangun di Provinsi Jambi, merupakan perpaduan etnis dari Minangkabau (komunitas penghulu dan komunitas Batin), Palembang (yang dikenal sebagai suku Pindah), dan penduduk asli Jambi. Penduduk di Kabupaten Batanghari merupakan perpaduan dari Minangkabau yang diperkirakan datang pada sekitar abad ke-11.

Provinsi Jambi termasuk salah satu daerah yang dapat mempertahankan keharmonisan hubungan antar etnis tersebut, baik antar penduduk pendatang maupun penduduk asli. Sepanjang sejarahnya tidak terdapat konflik sesama mereka. Kehadiran mereka di daerah Jambi merupakan salah satu pusat perdagangan dikawasan pantai Timur Sumatera dan Selat Malaka. Kedatangan mereka telah menambah jumlah masyarakat yang plural. Mereka melakukan proses integrasi sebagai generasi berikutnya mengidentifikasikan diri sebagai Orang Melayu Jambi.

Menurut data BPS (2023), penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2023 berjumlah 3.831,00 jiwa yang terdiri dari 1.952,80 jiwa penduduk laki-laki dan 1.878,20 jiwa penduduk perempuan. Kota Jambi merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak 627,8 jiwa (BPS, 2023). Besarnya jumlah penduduk di Kota Jambi didorong oleh perannya sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi dan juga sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Jambi.

3.4 Topografi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 meter dpl ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 kelompok variasi ketinggian (Bappeda Provinsi Jambi):

1. Daerah daratan rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah daratan rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.
2. Daerah daratan dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di

Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari.

3. Daerah daratan tinggi > 500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

3.5 Potensi Wilayah

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No 26 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun kawasan strategis nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi yaitu :

1. Kawasan taman nasional kerinci seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan).
2. Kawasan taman nasional berbak (Provinsi Jambi dan Riau).
3. Kawasan taman nasional bukit tiga puluh (Provinsi Jambi dan Riau).
4. Kawasan taman nasional bukit dua belas (Provinsi Jambi).

3.6 Perekonomian Provinsi Jambi

Struktur ekonomi suatu daerah dapat diketahui dengan melihat komposisi dari Produk Domestik Bruto (PDRB). Dari komposisi ini dapat dilihat bagaimana peran atau kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB daerah. Semakin besar peran sektor terhadap total PDRB, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut terhadap perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan. Peningkatan Ekonomi yang terus menerus meningkat, dampaknya akan meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan Data PDRB di Provinsi Jambi Tahun 2021-2023.

Tabel 3.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi Tahun 2020-2023.

Sektor PDRB	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)			
	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.751,94	41.209,10	43.267,90	45.697,30
B. Pertambangan dan Penggalan	34.988,96	35.730,20	38.502,00	38.529,00
C. Industri Pengolahan	15.513,67	15.727,40	16.218,80	16.892,90
D. Pengadaan Listrik dan Gas	81,14	86,90	97,00	108,80
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	202,68	213,10	219,80	220,30
F. Kontruksi	11.140,58	12.025,00	11.919,00	12.870,50

G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.203,50	15.049,60	15.857,80	17.264,40
H. Transportasi dan Pergudangan	4.203,82	4.437,50	5.190,30	5.620,50
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.582,75	1.661,40	1.845,60	2.007,30
J. Informasi dan Komunikasi	6.101,01	6.335,00	6.794,20	7.304,00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.487,26	3.674,30	3.637,80	3.692,40
L. Real Estate	2.212,00	2.281,90	2.378,20	2.456,60
M.N. Jasa Perusahaan	1.480,60	1.540,30	1.773,40	2.071,90
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.823,16	4.929,30	4.897,50	5.043,20
P. Jasa Pendidikan	5.153,71	5.216,50	5.321,80	5.457,10
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.914,10	2.211,80	2.158,80	2.252,50
R.S.T.U. Jasa lainnya	1.513,38	1.521,30	1.640,10	1.780,30
PDRB	148.354,25	153.850,60	161.730,00	169.268,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024

Berdasarkan tabel 3.3 di atas data PDRB pada periode 2020-2023 tertinggi ada ditahun 2023 dan sektor tertinggi ada di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sedangkan yang terendah ada di sektor Pegadaian Listrik dan Gas. Dan total keseluruhan semua sektor PDRB pada tahun tertinggi yaitu 2023 adalah sebesar 169.268,80. Pemerintah bisa membantu meningkatkan PDRB dengan melakukan bantuan finansial dan promosi terhadap masing-masing sektor, dengan

tingginya sektor-sektor yang dihasilkan tersebut terutama untuk sektor-sektor unggulan yang akan membuat pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.

3.7 Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Provinsi Jambi

Berdasarkan laporan perekonomian Provinsi Jambi dari bank Indonesia, sektor-sektor ekonomi unggulan yang ada di Provinsi Jambi ditempati oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan:

1. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor salah satu sektor unggul yang ada di Provinsi Jambi, karena kondisi yang geografis dan membaiknya produktivitas tanaman serta peningkatan harga komoditas membuat pertanian masih unggul dalam membangun perekonomian provinsi Jambi.

2. Kehutanan

Sektor unggul kedua di Provinsi Jambi adalah kehutanan, Provinsi Jambi memiliki hutan yang cukup banyak dan dengan kehutanan yang terjaga baik di Provinsi Jambi membuat sektor ini tetap unggul.

3. Perikanan

Hasil dari perikanan masih menjadi sektor unggul yang ada di Provinsi Jambi. Dikarenakan Provinsi Jambi memiliki perairan yang cukup luas dan banyak yang bekerja sebagai nelayan, maka sektor ini termasuk sektor yang unggul memengaruhi perekonomian di Provinsi Jambi.

3.8 Tingkat Pendidikan Provinsi Jambi

Tingkat pendidikan merupakan peran penting dalam suatu negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu indikator pendidikan disuatu wilayah adalah Angka Rata-Rata Lama Sekolah.

Tingkat pendidikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, karena peningkatan produktivitas tenaga kerja yang bertumpu pada pendidikan pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan kerja. Berikut data rata-rata lama sekolah:

Tabel 3.4

Rata – Rata Lama Sekolah di Provinsi Jambi

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (%)
2019	8,45
2020	8,55
2021	8,60
2022	8,68
2023	8,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024

Berdasarkan tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Jambi tahun 2019-2023 mengalami berfluktuasi, rata-rata lama sekolah yang paling tertinggi di tahun 2023 sebesar 8,81%, dan pada tahun 2019 adalah angka rata – rata lama sekolah paling rendah selama 5 tahun terakhir sebesar 8,45%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan anggaran pendidikan, pembangunan infrastruktur sekolah yang tidak merata, dan kesadaran masyarakat akan pendidikan yang sangat kurang.

Berikut ada data sekolah berdasarkan tingkat nya yaitu SD, SMP, SMA, S1:

Tabel 3.5
Perkembangan Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi

Tahun	SD	SMP	SMA	S1
2019	661.501	337.277	484.843	208.161
2020	684.634	341.881	511.345	201.143
2021	669.941	318.714	535.073	223.112
2022	690.733	340.071	555.724	211.291
2023	642.926	329.234	588.800	241.304

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024

Pada data diatas bisa dilihat jumlah tingkat persentase pendidikan dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, selama 5 tahun terakhir. Pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 690.733 jiwa. Sedangkan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tahun 2020 juga mengalami kenaikan pada tingkat pendidikan sebesar 341.881 jiwa. Dan pada tingkat pendidikan di jenjang SMA dan S1 di tahun 2023 yang merupakan angka yang paling tinggi selama 5 tahun terakhir.

3.9 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencan pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

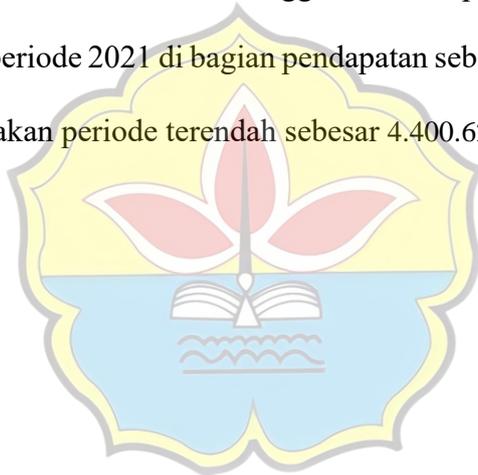
Tabel 3.6

Data Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Jambi

Tahun	Pendapatan	Belanja
2019	4.575.193	5.244.690
2020	4.400.624	4.802.948
2021	4.294.675	4.534.149
2022	4.705.588	4.772.689
2023	4.909.073	5.501.684

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024

Berdasarkan tabel 3.9 data diatas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terbanyak di selama periode 2019-2023 ada ditahun 2019 sebanyak 4.575.193 juta rupiah, dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terendah ada pada periode 2021 di bagian pendapatan sebesar 4.294.675 juta rupiah, dan di 2020 merupakan periode terendah sebesar 4.400.624 juta rupiah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel dependent serta independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas dilakukan dengan uji statistik. Uji statistik ini adalah One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Pengujian normalitas ini dilakukan dengan analisis tabel menggunakan aplikasi SPSS.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.06117521
	Absolute	.150
Most Extreme Differences	Positive	.113
	Negative	-.150
Kolmogorov-Smirnov Z		.671
Asymp. Sig. (2-tailed)		.759

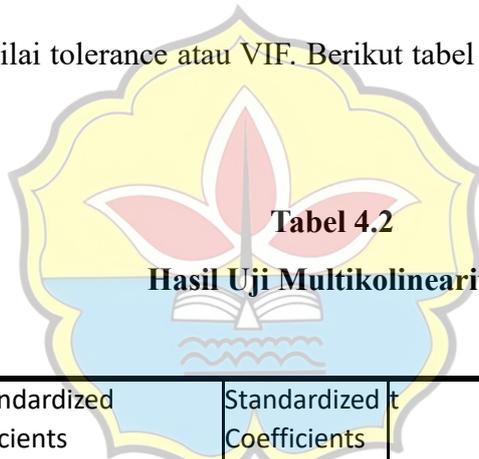
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan tingkat signifikan, yang menunjukkan bahwa Asimp.Sig (2-tailed) sebesar 0,759. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel atau residual dalam penelitian ini berdistribusi secara normal, karena Asimp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 atau 5%.

4.1.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kolerasi antar variabel-variabel independent dalam model regresi tersebut. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam mode regresi dapat dilihat dari tabel nilai tolerance atau VIF. Berikut tabel hasil uji multikolinearitas di bawah ini:



Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	-10.633	7.091		-1.500	.153		
X1	2.619	1.348	1.474	1.943	.070	.045	22.410
X2	3.663	1.199	.928	3.056	.008	.279	3.588
X3	-.753	.218	-2.413	-3.453	.003	.053	19.002

a. Dependent Variable: Y

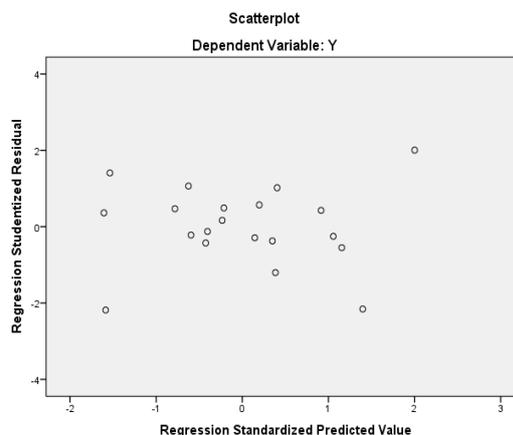
Berdasarkan tabel 4.2 tentang Uji Multikolinearitas diatas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari variabel independent jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki nilai

sebesar $X_1=0,045$, $X_2=0,279$, $X_3=0,053$ yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,1 dan untuk nilai variance inflation factor (VIF) di variabel jumlah penduduk sebesar 22,410, untuk tingkat pendidikan sebesar 3,588, variabel realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 19,002 yang dimana semua menunjukkan nilai VIF ada yang di atas 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa adanya Multikolinearitas antara jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Jambi 2004-2023.

4.1.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas untuk menentukan apakah model regresi akan terjadi ketidak samaan dengan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan mengamati grafik dengan pola titik-titik yang menyebar diatas dan di bawah sumbu Y. Namun apabila titik-titik hanya menumpuk di satu tempat saja maka artinya dalam penelitian ini terjadi ketidaksamaan atau terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil nya.

Gambar 4.1
ScatterPlot (Hasil Uji Heteroskedastisitas)



Pada grafik scatterplot atau uji heteroskedastisitas ini tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, pada gambar di atas terlihat bahwa titik-titik sumbu Y tidak membentuk pola tertentu dan tidak terjadi heteroskedastisitas pada regresi dalam penelitian ini.

4.1.1.4 Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi untuk menentukan apakah model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika ada kolerasi, maka dikatakan telah terjadi autokolerasi. Suatu model yang baik seharusnya tidak terdapat autokolerasi. Uji autokolerasi pada penelitian ini menggunakan uji durbin Watson. Jika hasil uji durbin Watson berada diantara dU dan 4-dU maka dikatakan dalam data tidak terjadi autokolerasi. Berikut adalah hasil uji Durbin Watson dibawah ini:

Tabel 4.3
Uji autokolerasi dari nilai durbin watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.767 ^a	.589	.512	.06666	2.217

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas, diketahui nilai durbin watson untuk penelitian ini adalah 2,217 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikan 5%. Daerah bebas autokolerasi untuk jumlah sampel 20 dan jumlah variabel independen 3 maka

diperoleh nilai dU sebesar 1,6763 nilai ini lebih besar dari nilai dW 2,217 ($dU = 1,6763 < dW = 2,217$) dan nilai ($dW = 2,217 < 4-dU = 2,324$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokolerasi.

4.1.2 Persamaan Regresi Linear Berganda

Persamaan analisis linear berganda adalah suatu alat analisis yang bertujuan untuk melihat pengaruh hubungan antar dua variabel atau variabel lebih, dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel independent (X) dan variabel terikat (Y). Analisis regresi linear ini tidak hanya menunjukkan kekuatan kolerasi positif dan negatif, tetapi juga memprediksi nilai variabel independent ketika variabel dependen meningkat atau menurun. Uji regresi linear ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-10.633	7.091				
	X1	2.619	1.348	1.943	.070	.045	22.410
	X2	3.663	1.199	3.056	.008	.279	3.588
	X3	-.753	.218	-3.453	.003	.053	19.002

a. Dependent Variable: Y

Menurut hasil yang diperoleh tercantum pada output regresi tabel 4.4 model analisis regresi linear berganda yang dipakai dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -10.633 + 2.619 X_1 + 3.663 X_2 - 0,753 X_3 + e$$

Persamaan regresi linear tersebut diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstan sebesar -10.633 yang mana apabila ketika variabel jumlah penduduk (X_1), tingkat pendidikan (X_2), realisasi anggaran pendapata dan belanja daerah (APBD) (X_3) dianggap sama bernilai dengan 0. Maka, nilai variabel jumlah pengangguran terbuka (Y) sebesar -10.633 .
2. Variabel jumlah penduduk (X_1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2.619. Jika semua hal lain tetap konstan, ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel jumlah penduduk sebesar 1% maka variabel jumlah pengangguran terbuka meningkat sebesar 2.619 %, dengan asumsi semua variabel lain di anggap konstan.
3. Variabel tingkat pendidikan (X_2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 3.663. Maka hal ini juga menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel tingkat pendidikan sebesar 1% maka akan meningkatkan variabel tingkat pendidikan sebesar 3.663 %.
4. Variabel realisasi APBD (X_3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.753, hal ini juga menunjukkan bahwa dengan menurunnya variabel

realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 1% , maka akan menurunnya variabel jumlah pengangguran sebesar -0,753.

4.1.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini semakin tinggi koefisien determinasi maka akan semakin baik model tersebut dalam arti besar kemampuan variabel bebas menerangkan variabel terikat. Semakin mendekati 1 atau 100% maka semakin besar pengaruh variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya jika R^2 menunjukkan angka 0 (nol) tidak tepat menaksir garis linear tersebut. Berikut adalah hasil dari pengujian nilai koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Koefisien determinasi (R^2) dari variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.767 ^a	.589	.512	.06666	2.217

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel bebas yaitu jumlah penduduk (X1), tingkat pendidikan (X2), dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (X3) memberikan kontribusi terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran dengan nilai R Square sebesar 0,512 atau 51,2%. Dengan nilai tersebut, maka variabel bebas memberikan kontribusi sebesar 0,512 atau 51,2% terhadap variabel terikat yaitu jumlah pengangguran terbuka (Y) di

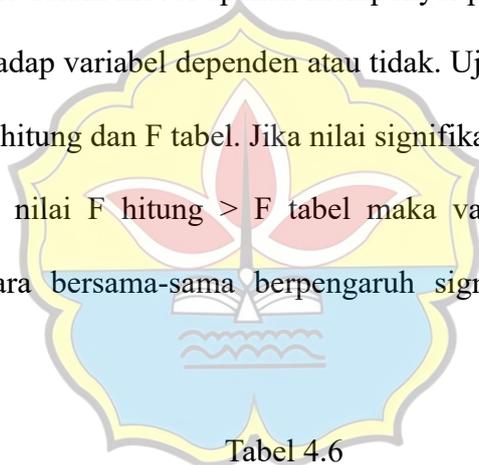
Provinsi Jambi. Sedangkan faktor-faktor diluar cakupan penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 48,8% terhadap jumlah pengangguran terbuka (Y).

4.1.4 Uji Hipotesis

4.1.4.1 Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Secara Simultan Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka

a. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan ke dalam model apakah mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau tidak. Uji F dilakukan dengan cara membandingkan F hitung dan F tabel. Jika nilai signifikan F hitung $< \alpha = 0,05$ dan dibuktikan dengan nilai F hitung $> F$ tabel maka variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



Tabel 4.6

Hasil Uji F simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.102	3	.034	7.641	.002 ^b
Residual	.071	16	.004		
Total	.173	19			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Dalam hasil perhitungan menggunakan program SPSS dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Dengan nilai F_{hitung} adalah 7.641. dengan nilai F_{tabel} yaitu 3,24. Sedangkan derajat bebas untuk penyebut (X) adalah 3, dan derajat bebas untuk penyebut (N-K-1) adalah 16. Nilai F_{hitung} yang dihasilkan sebesar 7.641 lebih besar dari nilai kritis 3,24. oleh karena itu, kita bisa menolak H_0 dan menerima H_a , dengan berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan juga dapat disimpulkan bahwa jumlah pengangguran terbuka dipengaruhi oleh variabel independen yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

b. Uji t (Uji Parsial)

Untuk menguji hipotesis secara Parsial digunakan uji statistik t. Ini untuk menentukan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka ini berarti suatu variabel independent dan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependennya. Berikut tabel dibawah ini yang menunjukkan hasil dari SPSS yang menjelaskan tentang bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau masing-masing.

Tabel 4.7
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-10.633	7.091		-1.500	.153		
X1	2.619	1.348	1.474	1.943	.070	.045	22.410
X2	3.663	1.199	.928	3.056	.008	.279	3.588
X3	-.753	.218	-2.413	-3.453	.003	.053	19.002

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil setiap masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang di uji dengan uji-t secara rinci koefisien regresi pada setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Variabel Jumlah Penduduk

Nilai t-hitung variabel jumlah penduduk adalah 1.943 pada tingkat kepercayaan 5%, dengan derajat kebebasan 16, nilai t-tabel adalah 2,11991. Hasil penelitian menunjukkan bahwa t-hitung variabel jumlah penduduk lebih kecil dari t-tabel ($1.943 < 2,11991$) dan nilai signifikan sebesar 0,070, yang dimana lebih tinggi nilainya dari pada taraf signifikan sebesar 0,05 ($0,070 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 di terima, H_a di tolak artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi dari tahun 2004-2023.

b. Variabel Tingkat Pendidikan

Nilai t-hitung variabel tingkat pendidikan adalah 3,056 pada tingkat kepercayaan 5%, dengan derajat kebebasan 16, dan nilai t-tabel adalah 2,11991. Hasil penelitian nilai t pada variabel tingkat pendidikan adalah 3,056. Dimana nilai t-hitung variabel tingkat pendidikan lebih besar dari nilai t-tabel ($3,056 > 2,11991$). Level signifikan variabel tingkat pendidikan sebesar $0,008 < 0,05$, dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa hasil uji t atau uji secara parsial variabel tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dari tahun 2004-2023 terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

c. Variabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Nilai t-hitung variabel realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah -3.453, dengan tingkat kepercayaan 5%, dengan derajat kebebasan 16, dan nilai t-tabel adalah 2,11991. Hasil penelitian menunjukkan bahwa t-hitung variabel realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar -3.453, jika dibandingkan dengan t-tabel sebesar 2,11991 maka $-2,146 < 2,11991$. Level signifikan variabel realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar $0.003 < 0,05$, dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai nilai signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

4.2 Analisis dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Seperti yang telah diketahui, data-data yang dijadikan sampel penelitian ini telah lolos semua uji

asumsi klasik yang menandakan bahwa 20 sampel ini layak digunakan sebagai tolak ukur hasil penelitian yang kemudian ditarik kesimpulannya.

4.2.1 Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap jumlah pengangguran terbuka

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara simultan terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi, maka bisa dilihat bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka dari itu pengaruh yang signifikan antara variabel independen yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu jumlah pengangguran terbuka. Pada penelitian di atas dijelaskan dengan nilai F_{hitung} 7.641, yang artinya lebih besar dari nilai F_{tabel} yang nilainya sebesar 3,24. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, terbukti bahwa variabel dependen tingkat jumlah pengangguran, secara signifikan dipengaruhi oleh faktor-faktor independen, yang meliputi jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari tahun 2004 sampai tahun 2023, variabel dependen jumlah pengangguran di Provinsi Jambi dipengaruhi variabel independen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rangga, Juliansyah dan Diana (2019) yang berjudul ‘‘pengaruh jumlah penduduk dan pendidikan serta upah terhadap pengangguran di Kabupaten Paser’’ menyatakan bahwa jumlah penduduk

dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh besar 94,9% terhadap pengangguran.

4.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa jumlah penduduk (X_1) berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi, dimana hasil nilai koefisiennya sebesar 2.619 . Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa jika jumlah penduduk meningkat 1% maka akan menimbulkan peningkatan di jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi sebesar 2.619. Namun hal ini malah membuat jumlah pengangguran menurun, dikarenakan banyak lapangan kerja yang tercipta sehingga angka pengangguran menurun meskipun jumlah penduduk bertambah. Urbanisasi juga menjadi alasan sebagian penduduk mungkin bekerja di luar provinsi, dengan begitu jumlah penduduk bertambah tetapi tidak semuanya menjadi pengangguran karena mereka bekerja di luar daerah.

Pernyataan ini bertentangan dengan hasil teori dari Sukirno (2019), yang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat memicu tingginya angka pengangguran jika tidak diiringi dengan peningkatan peluang kerja.

Hasil uji t atau uji parsial menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah penduduk dengan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Kesimpulannya ini diperoleh karena nilai sg lebih besar dari nilai syarat signifikansi sebesar 0,05 ($0,070 > 0,005$). Dengan tingkat signifikansi sebesar 0,070 hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka. Hal

ini dapat terjadi dikarenakan adanya jumlah angkatan kerja atau para pencari pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerap para pekerja, ataupun lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cocok dengan latar belakang pendidikan. Dan tidak disediakan adanya lapangan pekerjaan oleh masyarakat itu sendiri, seperti membuka usaha sendiri yang memungkinkan banyak masyarakat lain membutuhkannya seperti, membuka counter hp yang menyediakan dan menjual kouta internet, handphone dan pulsa yang sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini. Dan dengan adanya internet dapat dilakukan seperti sekarang ini, seperti memasarkan dan menjualnya di sosial media.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Teresa (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran.

4.2.3 Pengaruh tingkat pendidik terhadap jumlah pengangguran terbuka.

Hasil pengujian analisis regresi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi, dimana nilai signifikan sebesar $0,008 < 0,05$ dengan nilai koefisien 3.663 dimana tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang positif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hubungan positif antara tingkat pendidikan dengan jumlah pengangguran terbuka.

Akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan teori Sukirno (2019) yang menjelaskan bahwa pendidikan mempunyai peran yang penting dalam mengurangi jumlah pengangguran terbuka. Hasil positif ini dimungkinkan

dengan alasan adanya pengangguran ini terjadi karena lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Kebanyakan unit usaha di setiap daerah bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan pertambangan yang membutuhkan tenaga kerja kasar. Untuk pekerja kasar lapangan beberapa pekerja banyak memiliki ijazah SMP untuk sektor perkebunan dengan pertanian. Sedangkan beberapa pekerja yang memiliki ijazah SMA beberapa dari mereka menjadi operator disektor pertambangan rata-rata mereka dilatih dipekerjakan oleh suatu ununit usaha atau perusahaan untuk menjalankan alat berat disektor pertambangan. Diduga pengangguran terbuka di Provinsi Jambi membuat variabel pendidikan pada data ini tidak nyata karena mereka yang memiliki ijazah pendidikan tinggi tersebut cenderung tidak sesuai dengan keahlian tenaga kerja tersebut. Ketika masyarakatnya memiliki pendidikan tinggi semakin banyak sedangkan permintaan tenaga kerjanya terbatas atau tidak sesuai dengan keahliannya maka juga akan mempengaruhi jumlah pengangguran tersebut.

Hasil penelitian ini menguatkan hasil yaitu penelitian dari Silvia Ayu (2022) tentang ‘’analisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur’’, yang menjelaskan bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki koefisiensi positif dan dapat dikatakan, jika tingkat pendidikan mengalami kenaikan 1% memungkinkam tingkat pengangguran terbuka akan mengalami kenaikan juga.

4.2.4 Pengaruh realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi

Hasil uji t atau uji parsial menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi, dimana nilai signifikan sebesar 0,003 dengan nilai koefisien -3.453 dimana realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berhubungan negatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini juga bertentangan dengan hasil teori mardiasmo (2015) yang menjelaskan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efisien dan efektif sangat penting dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka. Namun realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor-faktor lain yang berefek pada kualitas tenaga kerja di Jambi tidak memadai, seperti rendahnya tingkat pendidikan atau keterampilan, lapangan kerja yang tersedia mungkin tidak dapat diisi oleh penduduk setempat meskipun realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah mendukung penciptaan pekerjaan. Mengakibatkan, belanja yang sudah direncanakan tidak dapat segera direalisasikan karena ada beberapa proyek yang harus ditinjau kembali atau mengalami revisi anggaran. Dan hal ini membuat realisasi belanja menjadi terlambat. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak selalu secara langsung berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka karena

dampaknya pada jenis belanja, struktur ekonomi daerah, kesesuaian program dengan kebutuhan pasar kerja.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brilliant (2023), yang menyatakan bahwa belanja APBD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Karena di beberapa daerah menunjukkan bahwa peningkatan belanja publik pada proyek-proyek yang produktif seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan berpotensi menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Pengeluaran daerah yang tepat sasaran berperan penting dalam merangsang kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

4.3 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, yaitu:

1. Bagi pemerintah Provinsi Jambi perlu mempertimbangkan tentang laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi dengan cara memberdayakan penduduk yang ada agar bisa menurunkan jumlah pengangguran. Pemerintah perlu lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensial, seperti UMKM dan teknologi. Ini dapat membuat peluang kerja yang lebih luas dan fleksibel. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan khusus di bidang UMKM dan teknologi, agar lebih banyak tenaga kerja yang dapat diserap di sektor ini.
2. Bagi pemerintah Provinsi Jambi perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. Dengan adanya peningkatan akses dan

kualitas pendidikan maka pendidikan akan lebih terjangkau dan berkualitas yang harus dilakukan, baik pada sekolah tingkat dasar maupun tingkat lanjut, untuk mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terampil dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah juga harus membuat atau memberikan kurikulum yang berbasis kebutuhan industri, karena dengan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri agar lulusan lebih siap kerja dan dapat bersaing di pasar tenaga kerja.

3. Bagi pemerintah Provinsi Jambi perlu mempertimbangkan kebijakan tentang realisasi belanja APBD di Provinsi Jambi dengan cara mengalokasikan anggaran untuk peningkatan lapangan kerja, karena dengan adanya realisasi belanja APBD perlu diarahkan pada program-program yang dapat menciptakan lapangan kerja, seperti proyek infrastruktur, pembangunan sektor produktif, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah juga harus transparansi dan efektivitas pada pengelolaan APBD, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan APBD agar dana belanja publik efektif dalam mengurangi pengangguran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi belanja APBD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi tahun 2004-2023 dengan koefisien determinasi sebesar 0,417. Artinya variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan realisasi belanja APBD dapat menjelaskan pengaruh jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi sebesar 41,7%.
2. Secara parsial hasil regresi dalam penelitian menunjukkan bahwa:
 - a. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi pada periode 2004-2023 dengan nilai t sebesar $-0,263$ lebih kecil dari nilai t tabel ($-0,263 < 2,11991$).
 - b. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi dari tahun 2004 – 2023 dengan nilai t sebesar $3,060$ lebih besar dari nilai t tabel ($3,060 > 2,11991$).
 - c. Realisasi belanja APBD tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jambi periode 2004-2023 dengan

nilai t sebesar -1,902 yang artinya nilai t lebih kecil dari nilai t tabel ($-1,902 < 2,11991$).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang di dapat, berikut beberapa saran yang disimpulkan, sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya penciptaan lapangan kerja seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, terutama di daerah dengan populasi di usia produktif yang tinggi.
2. Pemerintah harus melihat perkembangan pendidikan dengan cara sesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Dan memperluas program pendidikan vokansional yang terkait langsung dengan sektor-sektor industri yang berkembang.
3. Pemerintah juga di harapkan agar lebih fokus pada program belanja yang dapat menciptakan lapangan kerja, seperti pembangunan infrastruktur, revitalitas UMKM, serta peningkatan daya saing sektor industri lokal. Pemerintah juga harus transparasi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBD sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar efektif dalam mengurangi pengangguran.
4. untuk para peneliti selanjutnya, disarankan untuk peneliti yang difokuskan pada analisis dampak jangka panjang dari program-program APBD yang berkaitan dengan pengangguran perlu dijadikan rujukan untuk perbaikan kebijakan kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, S.P, Hardiani, H, Etik, U. (2022). **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pendidikan**. Jurnal Ekonomi Aktual.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. **Rata-rata lama sekolah Tahun (2004-2023)** <https://jambi.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkzNyMy/-metode-baru--rata-rata-lama-sekolah.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. **Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun (2004-2023)**. <https://jambi.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0MyMy/realisasi-belanja-pemerintah-provinsi---ribu-rupiah-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. **Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Tahun (2009-2023)**.<https://jambi.bps.go.id/indicator/12/32/1/penduduk-provinsi.jambi.html/1000>.
- Badan Pusat Statistik. (2009-2023). **Provinsi Jambi Dalam Angka**, Berbagai Edisi. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun (2009-2023).**Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi**. <https://jambi.bps.go.id/indicator/6/500/2/pengangguran-terbuka-menurut-kabupaten-kota-dan-pendidikan-yang-ditamatkan-.html>
- Bidarti, A. (2020). **Teori Kependudukan**. Leuwiliang, Bogor: Lindan Bastari.
- Brain (2023). **Pengantar Administrasi Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Deepublish.
- Dermawan, D. (2015). **Ekonomi Pembangunan: Teori dan Aplikasi di Indonesia**. Bandung: Alfabeta.
- Dermawan, D. (2021).**Faktor Dominan Relativitas Kemiskinan**. Bandung: Alfabeta
- Candra (2019). **Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori dan Aplikasinya**. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Fitriani, S. (2016). **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: PT Andi
- Fitri, A. (2022). **Ekonomi Pembangunan**. Bandung. Widina Bhakti Persada.

Ghozali, I. (2018). **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS**. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hasyim, A. I. (2016). **Ekonomi Makro**. Jakarta: Kencana.

Irma, Y.A, Nanik, I, Lilis, Y. (2019). **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember.

Iswan. (2018). **Administrasi dan Manajemen Pendidikan**. Depok: Rajawali.

Mahmudi. (2016). **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo. (2015). **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: PT. Andi

Mankiw, N. (2013). **Pengantar Ekonomi Makro**. Jakarta: Salemba 4

Mankiw, N. (2018). **Pengantar Ekonomi Makro edisi 7**. Jakarta Selatan: Salemba 4

Mulyadi. (2016). **System Akuntansi**. Jakarta: Salemba.

Mulyadi. (2017). **Pendidikan Vokasi Pengangguran di Indonesia**. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Naf'an. (2014). **Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah**. Dalam Naf'an, **Ekonomi Maro Ekonomi Syariah**. Yogyakarta: graha Ilmu.

Naf'an. (2022). **Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah Edisi 2, dalam Naf'an**. Yogyakarta: Graha Ilmu

Pratowo, N. (2019). **Pengantar Ekonomi Makro**. Depok: RajaGrapindo Persada.3.

Rodliyah. (2021). **Pendidikan dan Ilmu Pendidikan**. Jawa Tengah : IAIN JEMBER PRESS

Sari, K. (2019). **Ruang Lingkup Ekonomi Makro**. Depok: Raja Grapindo Persada.

- Savira, A, Riko, S.W. (2024). **Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran.** Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan.
- Seran, S. (2016). **Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Versus Kemiskinan Penduduk.** Yogyakarta: Deepublish.
- Sukirno, S. (2008), **Makroekonomi Teori Pengantar edisi 3.** Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2011). **Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan.** Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2013). **Pengantar Teori Makroekonomi.** Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sukirno, S. (2019). **Makroekonomi Teori Pengantar.** Dalam S. Sukirno, . Jakarta: Rajawali Pers.
- Syurifto, P. (2018). **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran.** Jurnal Ecogen Universitas Negeri Padang.
- Teresa, dkk. (2022). **Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.** Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
- Todaro. (2006). **Pembangunan Ekonomi di Dunia edisi 9.** Jakarta: Erlangga.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Tahun	Jumlah Penduduk (X1)	Tingkat Pendidikan (X2)	Realisasi APBD (X3)	Jumlah Pengangguran Terbuka (Y)
2004	2.619.553	7,40	660.930	73.108
2005	2.635.968	7,54	642.833	133.964
2006	2.683.099	7,60	1.156.843	78.264
2007	2.742.196	7,66	1.105.388	76.090
2008	2.788.269	7,63	1.404.982	66.371
2009	2.834.164	7,68	1.530.073	73.904
2010	3.092.265	7,34	1.504.838	83.278
2011	3.169.814	7,48	2.432.067	60.169
2012	3.242.814	7,69	3.287.095	42.296
2013	3.317.034	7,80	3.577.072	70.361
2014	3.344.421	7,92	3.265.320	79.784
2015	3.402.052	7,96	3.604.245	70.349
2016	3.458.926	8,07	3.381.885	67.671
2017	3.515.017	8,15	4.583.486	66.816
2018	3.570.272	8,23	4.869.537	69.075
2019	3.624.579	8,45	5.244.690	73.965
2020	3.677.894	8,55	4.802.948	93.990
2021	3.585.100	8,60	4.534.149	93.754
2022	3.631.100	8,68	4.772.689	86.459
2023	3.760.275	8,81	5.501.684	85.579

Lampiran 2

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Perkembangan (%)
1	2004	2.619.553	-
2	2005	2.635.968	0,63
3	2006	2.683.099	1,79
4	2007	2.742.196	2,20
5	2008	2.788.269	1,68
6	2009	2.834.164	1,65
7	2010	3.092.265	9,11
8	2011	3.169.814	2,51
9	2012	3.242.814	2,30
10	2013	3.317.034	2,29
11	2014	3.344.421	0,83
12	2015	3.402.052	1,72
13	2016	3.458.926	1,67
14	2017	3.515.017	1,62
15	2018	3.570.272	1,57
16	2019	3.624.579	1,52
17	2020	3.677.894	1,47
18	2021	3.585.100	(2,52)
19	2022	3.631.100	1,28
20	2023	3.760.275	3,56
Rata-rata		3.234.741	1,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024

Lampiran 3

No	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (%)	(%)
1	2004	7,40	-
2	2005	7,54	1,89
3	2006	7,60	0,80
4	2007	7,66	0,79
5	2008	7,63	(0,39)
6	2009	7,68	0,66
7	2010	7,34	(4,43)
8	2011	7,48	1,91
9	2012	7,69	2,81
10	2013	7,80	1,43
11	2014	7,92	1,54
12	2015	7,96	0,51
13	2016	8,07	1,38
14	2017	8,15	0,99
15	2018	8,23	0,98
16	2019	8,45	2,67
17	2020	8,55	1,18
18	2021	8,60	0,58
19	2022	8,68	0,93
20	2023	8,81	1,50
Rata-Rata		7,96	0,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024

Lampiran 4

No	Tahun	Pendapatan (Juta Rupiah)	Belanja (Juta Rupiah)	Silpa (Juta Rupiah)	
				Defisit	Surplus
1	2004	649.936.054	660.930	10.993.963	-
2	2005	748.820.793	642.833	-	105.987.772
3	2006	894.925.332	1.156.843	261.917.456	-
4	2007	1.155.350.574	1.105.388	-	49.962.685
5	2008	1.436.381.400	1.404.982	-	31.398.916
6	2009	1.353.900.464	1.530.073	176.172.728	-
7	2010	1.304.934.650	1.504.838	199.903.099	-
8	2011	2.078.806.913	2.432.067	353.260.385	-
9	2012	2.654.694.237	3.287.095	632.401.128	-
10	2013	2.886.305.068	3.577.072	690.767.077	-
11	2014	2.981.991.350	3.265.320	283.328.396	-
12	2015	10.926.828.013	3.604.245	-	1.982.817.625
13	2016	12.419.024.640	3.381.885	-	1.680.829.968
14	2017	13.737.384.249	4.583.486	10.000	-
15	2018	14.486.625.856	4.869.537	0	0
16	2019	15.261.328.378	5.244.690	0	0
17	2020	4.400.624.372	4.802.948	29.768.379	-
18	2021	4.294.675.328	4.534.149	221.473.516	-
19	2022	14.055.052.527	4.772.689	-	74.017.009
20	2023	14.034.079.016	5.501.684	685.203.953	-
Rata-Rata		6.088.083.960	6.069.092.766	295.433.340	654.168.996

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2024

Lampiran 5

No	Tahun	Tingkat Pengangguran (%)	Jumlah Pengangguran (Jiwa)	Angkatan Kerja (Jiwa)	Perkembangan Pengangguran (%)
1	2004	6,04	73.108	1.137.460	-
2	2005	10,74	133.964	1.247.114	83,24
3	2006	6,62	78.264	1.181.650	(41,58)
4	2007	6,22	76.090	1.222.951	(2,78)
5	2008	5,14	66.371	1.290.854	(12,77)
6	2009	5,54	73.904	1.334.496	11,35
7	2010	5,08	83.278	1.545.683	12,68
8	2011	4,02	60.169	1.482.335	(27,75)
9	2012	3,22	42.296	1.494.974	(29,70)
10	2013	4,84	70.361	1.467.007	66,35
11	2014	5,08	79.784	1.570.822	13,39
12	2015	4,34	70.349	1.620.752	(11,83)
13	2016	4,00	67.671	1.692.193	(3,81)
14	2017	3,87	66.816	1.724.633	(1,26)
15	2018	3,86	69.075	1.791.899	3,38
16	2019	4,19	73.965	1.683.575	7,08
17	2020	5,13	93.990	1.739.033	27,07
18	2021	5,09	93.754	1.840.594	(0,25)
19	2022	4,59	86.459	1.884.278	(7,78)
20	2023	4,53	85.579	1.887.840	(1,02)
Rata-rata		38,90	77,262	1.542.007	4,42

Lampiran 6

Hasil output data SPSS (Uji Asumsi Klasik)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.767 ^a	.589	.512	.06666	2.217

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-10.633	7.091		-1.500	.153		
	X1	2.619	1.348	1.474	1.943	.070	.045	22.410
	X2	3.663	1.199	.928	3.056	.008	.279	3.588
	X3	-.753	.218	-2.413	-3.453	.003	.053	19.002

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	X1	X2	X3
1	1	3.999	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.001	56.649	.00	.00	.00	.05
	3	.000	156.406	.00	.00	.87	.09
	4	1.725E-006	1522.421	1.00	1.00	.13	.85

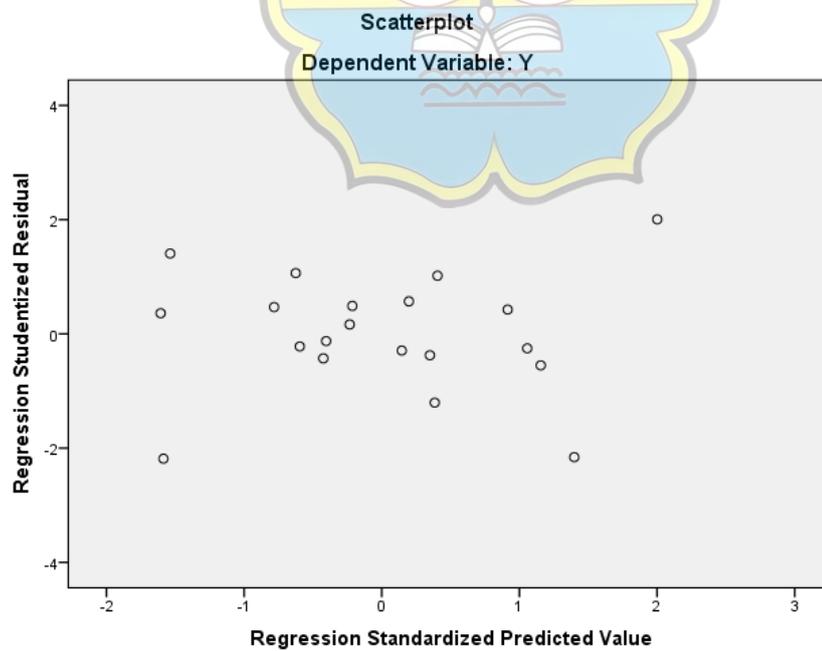
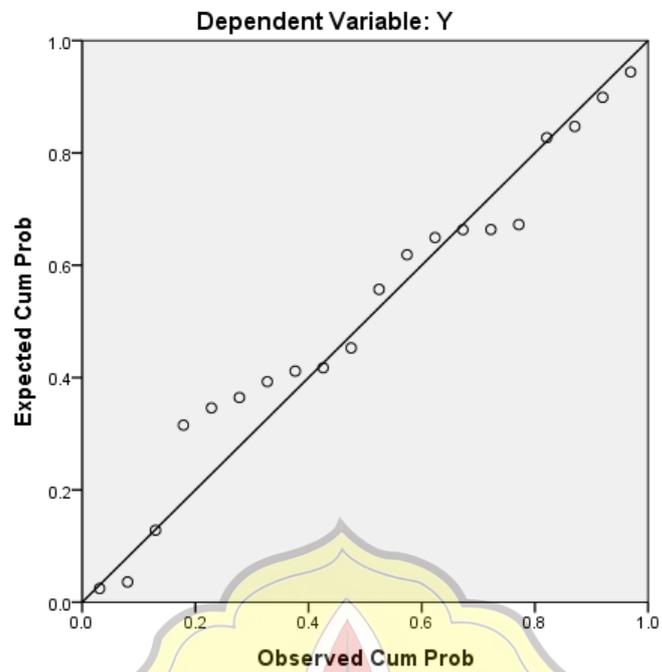
a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4.7599	5.0240	4.8775	.07322	20
Std. Predicted Value	-1.606	2.001	.000	1.000	20
Standard Error of Predicted Value	.018	.045	.029	.007	20
Adjusted Predicted Value	4.7466	5.0328	4.8760	.07414	20
Residual	-.13137	.10597	.00000	.06118	20
Std. Residual	-1.971	1.590	.000	.918	20
Stud. Residual	-2.185	2.005	.009	1.052	20
Deleted Residual	-.17277	.16853	.00149	.08102	20
Stud. Deleted Residual	-2.526	2.243	-.011	1.152	20
Mahal. Distance	.421	7.641	2.850	1.899	20
Cook's Distance	.000	.593	.088	.171	20
Centered Leverage Value	.022	.402	.150	.100	20

a. Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.06117521
	Absolute	.150
Most Extreme Differences	Positive	.113
	Negative	-.150
	Kolmogorov-Smirnov Z	.671
Asymp. Sig. (2-tailed)		.759

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

